



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/493 /II.02/HK/2016

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dengan mengacu pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.

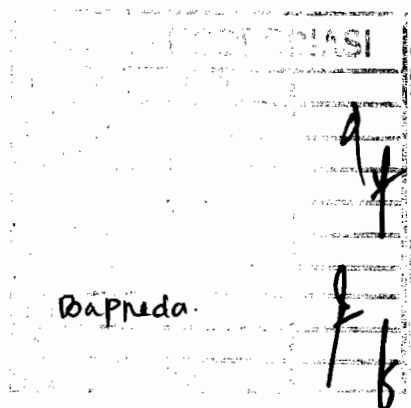
- KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menetapkan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi pedoman unit kerja dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Rencana Kerja.

KETIGA : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang harus menetapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi:

- 1 Sekretariat Pemerintah Provinsi Lampung:
 - a. Biro Tata Pemerintahan Umum;
 - b. Biro Otonomi Daerah;
 - c. Biro Hukum;
 - d. Biro Perekonomian;
 - e. Biro Administrasi Pembangunan;
 - f. Biro Bina Sosial;
 - g. Biro Bina Mental;
 - h. Biro Umum;
 - i. Biro Humas dan Protokol;
 - j. Biro Keuangan;
 - k. Biro Perlengkapan dan Aset;
 - l. Biro Organisasi;
- 2 Sekretariat DPRD;
- 3 Inspektorat Provinsi;
- 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- 6 Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah;
- 7 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- 8 Badan Ketahanan Pangan Daerah;
- 9 Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 10 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
- 11 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 12 Badan Kepegawaian Daerah;
- 13 Badan Pendidikan dan Latihan Daerah;
- 14 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah;
- 15 Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 16 Badan Perwakilan Pemerintah Daerah;
- 17 Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;
- 18 RSUD Dr. H. Abdul Moeloek;
- 19 RS. Jiwa Daerah;
- 20 Kantor Sandi Daerah;
- 21 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 22 Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 23 Dinas Kesehatan;
- 24 Dinas Sosial;
- 25 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 26 Dinas Perhubungan;
- 27 Dinas Komunikasi dan Informatika;

- 28 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 29 Dinas Bina Marga;
- 30 Dinas Pengairan dan Pemukiman;
- 31 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
- 32 Dinas Perindustrian;
- 33 Dinas Perdagangan;
- 34 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 35 Dinas Perkebunan;
- 36 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 37 Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 38 Dinas Kehutanan;
- 39 Dinas Pertambangan dan Energi;
- 40 Dinas Pendapatan Daerah;
- 41 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- 42 Sekretariat Dewan Pengurus Korpri;
- 43 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- 44 Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 05 Agustus 2016

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Para Kepala SKPD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

File perkebun regis

6 / 493 / 11.02 / HK / 2016
5. 8. 2016

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	4
1.1.	Latar Belakang	4
1.2.	Tujuan	6
1.3.	Dasar Pertimbangan	7
1.3.1.	Dasar Hukum	7
1.3.2.	Perkembangan Makro Ekonomi Nasional	9
1.3.3.	Prospek Perekonomian Nasional	11
1.3.4.	Perubahan Asumsi Makro dalam Rancangan Perubahan APBN 2016	12
1.3.5.	Kerangka Kebijakan Keuangan Negara	13
1.3.6.	Perkembangan Makro Ekonomi Daerah	18
1.3.7.	Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi Daerah	22
1.3.8.	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	30
1.3.9.	Perubahan Asumsi Makro dalam Rancangan Perubahan RKPD 2016	33
1.3.10.	Kerangka Pokok Keuangan Daerah	34
BAB II	EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN SEMESTER I	36
BAB III	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS	42
3.1.	Sinkronisasi Program dengan Prioritas Pembangunan Daerah	42
3.2.	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan	77
3.3.	Program dan Kegiatan Berdasarkan SKPD	84
BAB IV	PENUTUP	121

DAFTAR GRAFIK

Grafik I-1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional (Persen yoy).....	18
Grafik I-2 Kontribusi PDRB Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha.....	20
Grafik I-3 Inflasi Tahunan Lampung dan Indonesia	21
Grafik I-4 Tingkat Pengangguran Provinsi Lampung dan Nasional.....	23
Grafik I-5 Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Kerja Utama.....	24
Grafik I-6 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Nasional	26
Grafik I-7 IPM Provinsi Lampung dan Indonesia.....	27
Grafik I-8 Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung.....	28
Grafik I-9 Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung dan Penyusunnya	29
Grafik I-10 Indeks yang Diterima Subsektor di Provinsi Lampung	30
Grafik I-11 Indeks yang Dibayarkan Seubsektor di Provinsi Lampung.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Asumsi Makro dalam Perubahan APBN 2016 sesuai Sidang Paripurna DPR, Selasa 28 Juni 2016.....	13
Tabel I-2 Ringkasan LKPP Unaudited 2015, APBN 2016, dan RAPBN 2016 (Miliar Rupiah)	17
Tabel I-3 Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (persen)	19
Tabel I-4 Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010 (persen).....	19
Tabel I-5 PDRB menurut Pengeluaran ADHB (triliun rupiah)	21
Tabel I-6 Inflasi Tahunan menurut Kelompok Barang dan Jasa (persen yoy)	22
Tabel I-7 Pengangguran Terbuka menurut Kota-Desa Provinsi Lampung, Februari 2015 – Februari 2016	23
Tabel I-8 Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung, Februari 2014 – 2016 (ribu)	24
Tabel I-9 Komposisi Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Lampung, Februari 2015 – Februari 2016	25
Tabel I-10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung menurut Daerah	26
Tabel I-11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota.....	27
Tabel I-12 Perubahan Asumsi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2016 ..	34
Tabel I-13 Kerangka Keuangan Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Lampung TA 2016	35
Tabel II-1 Realisasi Belanja Langsung sampai dengan Juni 2016.....	37
Tabel III-1 Rekap RKPD Perubahan Per Prioritas Provinsi Tahun 2016 Provinsi Lampung	43
Tabel III-2 Rekap Anggaran Penetapan Per Urusan Tahun 2016 Provinsi Lampung.....	78
Tabel III-3 Program dan Kegiatan Sebelum dan Sesudah Anggaran Perubahan Berdasarkan SKPD	84

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Guna menjamin kesinambungan antara proses perencanaan dengan penganggaran, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) berpedoman kepada RKPD. Lebih lanjut, ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan R-APBD; dan Pasal 265 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pula bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Anggaran Plafon Sementara (PPAS).

Sebagaimana diketahui, RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016, merupakan dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Anggaran Plafon Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya, APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, yang sebelumnya didahului dengan adanya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung Nomor 415.4/2966/II.02/2015 tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, dan kesepakatan Nomor 160/1298/13.01/ 2015 tanggal 16

November 2015 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

Merujuk Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa:

- 1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- 2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah, menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja SKPD dapat dilakukan apabila pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar-SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dengan demikian, Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016 mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara normatif, dokumen Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016 merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2016 yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

1.2. Tujuan

Memperhatikan dinamika pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada tahun berjalan, maka penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2016 bertujuan untuk:

- Memberikan gambaran atas perubahan asumsi Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2016 yang akan disusun;
- Menyesuaikan perubahan proyeksi penerimaan di sisi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah;
- Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
- Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan dan aspirasi yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas daerah dan nasional;
- Melakukan penyesuaian hasil dan keluaran dari program dan kegiatan prioritas melalui penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta penambahan atau

pengurangan pagu kegiatan, pergeseran anggaran, dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD;

- Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3. Dasar Pertimbangan

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan pula hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan dan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Lampung Tahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan Juni 2016. Hasil capaian kinerja tersebut menunjukkan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang telah disusun dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Lampung Tahun Anggaran 2016, diantaranya:

- Perubahan asumsi makro ekonomi;
- Perubahan proyeksi pendapatan daerah;
- Perubahan kebijakan pemerintah pusat;
- Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai; dan

Penyesuaian belanja daerah yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

1.3.1. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;

18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016;
20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016.

1.3.2. Perkembangan Makro Ekonomi Nasional

Hingga Triwulan I 2016 perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Dari sisi eksternal, pemulihan ekonomi global berjalan lambat dan tidak merata, disertai harga-harga komoditas di pasar internasional yang belum sepenuhnya bergerak menuju perbaikan sehingga berdampak negatif terhadap kinerja ekspor di berbagai daerah. Di sisi domestik, pengeluaran pemerintah, termasuk implementasi proyek infrastruktur, baik di pusat maupun daerah, masih belum berjalan secara optimal. Faktor eksternal dan domestik tersebut berdampak negatif terhadap daya beli konsumen dan minat investasi. Catatan statistik menunjukkan, perekonomian nasional tumbuh melambat menjadi 4,92% (yoy) dari 5,04% pada triwulan sebelumnya.

Rendahnya belanja pemerintah daerah pada Triwulan I 2016, turut menahan pertumbuhan ekonomi nasional. Secara umum, daerah-daerah dengan basis utama sektor SDA menunjukkan realisasi belanja di bawah rata-rata. Hal ini sejalan dengan menurunnya kinerja sektor-sektor SDA, yang kemudian berdampak pada menurunnya dana bagi hasil (DBH), yang menjadi sumber dana APBD. Meski demikian, kinerja konsumsi rumah tangga yang meningkat dapat menahan perlambatan ekonomi lebih dalam di berbagai daerah.

Inflasi nasional pada Triwulan I 2016 hingga April 2016 relatif terkendali di seluruh wilayah. Pada akhir Triwulan I 2016 tercatat sebesar 4,45% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan akhir Tahun 2015 yang tercatat sebesar 3,35% (yoy). Penurunan harga BBM, khususnya bahan bakar bersubsidi, yang diikuti oleh kebijakan penyesuaian

tarif listrik pada bulan Februari dan Maret 2016 serta koreksi tarif angkutan udara turut menjadi faktor penyebab rendahnya inflasi di berbagai daerah. Komoditas bahan pangan yang mengalami koreksi harga ke bawah antara lain, daging, ayam ras, dan telur, kondisi serupa juga terjadi pada komoditas beras. Sementara itu tekanan inflasi berasal dari komoditas hortikultura yaitu bawang merah dan cabai merah mengalami peningkatan harga, beberapa daerah sentra bawang merah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mengalami kendala produksi akibat tingginya intensitas hujan.

Tekanan inflasi terendah terjadi di wilayah Jawa yaitu sebesar 3,93% (yoy), kemudian Kawasan Timur Indonesia (KTI), dan Kalimantan, masing-masing sebesar 4,72% (yoy), dan 5,07% (yoy). Inflasi tertinggi pada Triwulan I 2016 terjadi di Sumatera, yang mencapai 5,71%. Tekanan inflasi di Sumatera pada Triwulan I 2016 cukup tinggi dari akhir tahun 2015 yang tercatat sebesar 3,05%. Hal ini disebabkan peningkatan harga beberapa komoditas pangan terkait pergeseran masa tanam. Penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Triwulan I 2016, memicu rendahnya inflasi untuk komoditas premium/solar dan angkutan dalam kota di beberapa daerah.

Memasuki awal April 2016 tekanan inflasi lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya terutama sebagai dampak penurunan harga beras dan cabai merah didukung oleh panen raya yang mulai berlangsung. Deflasi April 2016 tercatat sebesar 0,45% (mtm) atau Inflasi awal April 3,60% (yoy), lebih rendah dari pada akhir Maret 2016 sebesar 4,45% (yoy). Dorongan deflasi ditopang oleh kelompok *administered prices* dan bahan pangan. Deflasi bahan pangan terutama bersumber dari komoditas cabai merah, beras, ikan segar, daging ayam ras, dan cabai rawit. Deflasi *administered prices* juga dipicu oleh penyesuaian harga BBM dan dampak lanjutannya. Selain itu, kondisi pasokan yang relatif terjaga ditengah peningkatan permintaan menjelang hari besar keagamaan turut mendukung pencapaian inflasi yang lebih rendah. Meski demikian, tekanan inflasi dari komoditas pangan khususnya bawang merah, bawang putih dan minyak goreng dalam jangka pendek perlu diwaspadai seiring dengan keterbatasan pasokan dan peningkatan harga CPO.

Meninjau perdagangan internasional, perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing berperan penting dalam transaksi perdagangan sekaligus menjadi salah satu barometer stabilitas makro ekonomi. Dalam konteks tersebut, perkembangan level dan fluktuasi nilai tukar selalu menjadi topik pembicaraan menarik dan mengundang fokus perhatian banyak pihak, khususnya manakala nilai tukar mata uang domestik mengalami tekanan. Sebagai negara dengan perekonomian yang terbuka, dinamika ekonomi global akan memengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia. Interaksi perekonomian nasional dengan perekonomian global, terjalin melalui kegiatan perdagangan internasional. Dukungan kegiatan perdagangan internasional pada kinerja ekonomi dipengaruhi oleh seberapa besar ekspor dapat dipacu, meskipun impor tetap dilakukan.

Faktor utama yang dapat memengaruhi kinerja ekspor yaitu permintaan negara mitra dagang dan perkembangan nilai tukar. Dalam beberapa waktu terakhir kondisi nilai tukar rupiah cenderung terdepresiasi. Secara teori kondisi ini akan menguntungkan kinerja ekspor, karena pelemahan nilai tukar dapat memperbaiki daya saing komoditas ekspor dari sisi harga. Meski demikian pemanfaatan peluang sangat tergantung pada faktor-faktor lain yang memengaruhi daya saing dari komoditas ekspor tersebut.

1.3.3. Prospek Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi nasional untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan membaik dibandingkan dengan tahun 2015. **Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 diperkirakan berada di kisaran 5,0%-5,4%**, membaik dari realisasi pertumbuhan tahun 2015 yang tercatat sebesar 5,04%. Gairah kegiatan konsumsi dan investasi diharapkan menjadi penopang membaiknya kinerja ekonomi. Belanja pemerintah yang diproyeksi meningkat pada triwulan II 2016 menjadi stimulus penggerak kegiatan ekonomi, terutama investasi. Sejalan dengan hal tersebut, optimisme dunia usaha diprediksi membaik sehingga mendorong ekspansi usaha.

Selain itu, harapan akan membaiknya perekonomian global, terutama ekonomi negara-negara maju, berpotensi menciptakan peluang ekspor. Geliat yang terjadi di dunia usaha akan berdampak positif pada membaiknya pendapatan masyarakat, sehingga daya beli membaik. Lebih lanjut perbaikan daya beli akan mendorong kegiatan konsumsi. Sebagai

cerminan dari meningkatnya investasi, kegiatan impor juga diperkirakan akan meningkat, terutama untuk impor bahan baku dan barang modal.

Inflasi sepanjang tahun 2016 diperkirakan tetap terkendali hingga akhir tahun, sehingga masih berada dalam kisaran sasaran **inflasi nasional sebesar 4% plus minus 1%**. Berbagai upaya pengendalian inflasi serta koordinasi yang semakin kuat dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, diyakini akan mampu membawa pergerakan inflasi ke level yang lebih rendah. Optimisme terhadap kemampuan mengendalikan inflasi daerah tersebut ditopang oleh upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam merumuskan arah kebijakan untuk menjaga stabilitas harga, baik kebijakan jangka pendek (musiman) maupun yang lebih berjangka panjang (struktural). Dengan adanya perencanaan pengendalian inflasi yang lebih baik, diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi terhadap barang-barang kebutuhan masyarakat, terutama pangan, dapat terwujud. Selain itu, pemberian informasi kepada masyarakat tentang upaya yang akan ditempuh pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan merupakan strategi komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi harga pada kalangan masyarakat.

1.3.4. Perubahan Asumsi Makro dalam Rancangan Perubahan APBN 2016

Berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik terkini, serta berbagai tantangan perekonomian yang dihadapi, Pemerintah mengajukan perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan dalam APBN tahun 2016. Hasil pembahasan antara Pemerintah bersama DPR pada tanggal 28 Juni 2016 mensepakati asumsi dasar ekonomi makro yang diusulkan dalam R-APBNP tahun 2016 sebagai berikut:

Laju inflasi sepanjang tahun 2016 diperkirakan sebesar 4,0 persen, lebih rendah dibandingkan asumsi dalam APBN tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 4,7 persen. Besaran inflasi sepanjang tahun 2016 akan terpengaruh oleh perkembangan ekonomi global dan tren pelemahan harga komoditas terutama energi. Sementara dari sisi domestik, stabilitas inflasi akan didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga harga kebutuhan pokok masyarakat.

Beberapa faktor positif terutama penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia, perbaikan kinerja transaksi berjalan, inflasi yang rendah, serta membaiknya perekonomian diharapkan mampu menjaga stabilisasi dan meredam depresiasi nilai tukar rupiah. Dengan mempertimbangkan kondisi terkini dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak pada kisaran Rp13.500 per dolar AS, menguat dibandingkan asumsinya dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp13.900 per dolar AS.

Tren penurunan harga minyak mentah dunia diperkirakan memengaruhi kinerja industri hulu migas Indonesia. ICP diproyeksikan berada pada kisaran US\$40 per barel lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN tahun 2016 sebesar US\$50 per barel. Perubahan tersebut antara lain disebabkan masih lemahnya perekonomian global, di tengah pasokan minyak yang masih tinggi.

Lifting minyak dan gas bumi pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 1.970 ribu barel setara minyak per hari, yang meliputi *lifting* minyak bumi sebesar 820 ribu barel per hari dan *lifting* gas bumi sebesar 1.150 ribu barel setara minyak per hari. Tren penurunan produksi minyak berpengaruh pada *lifting* gas bumi. Rincian asumsi dasar ekonomi makro tahun 2015 dan 2016 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel I-1 Asumsi Makro dalam Perubahan APBN 2016 sesuai Sidang Paripurna DPR, Selasa 28 Juni 2016

INDIKATOR MAKRO	ASUMSI APBN 2016	ASUMSI APBN-P 2016
Pertumbuhan ekonomi	5,3 persen	5,2 persen
Tingkat Inflasi	4,7 persen	4,0 persen
Nilai tukar rupiah rata-rata	Rp13.900/USD	Rp 13.500 / USD
Tingkat suku bunga SPN 3 bulan	5,5 persen	5,5 persen
Harga minyak mentah Indonesia rata-rata	USD 50/ barel	USD 40 per barel
<i>Lifting</i> minyak rata-rata	830 ribu barel/hari;	820 ribu barel per hari
<i>Lifting</i> gas rata-rata	1.155 ribu barel setara minyak per hari	1.150 ribu barel setara minyak per hari

1.3.5. Kerangka Kebijakan Keuangan Negara

Rancangan Perubahan APBN tahun 2016 diajukan sebagai langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2016 dan

tetap menjaga pencapaian berbagai sasaran pembangunan nasional. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dan langkah-langkah pengamanan pelaksanaan APBN tahun 2016 dilakukan baik pada pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran.

Secara umum langkah-langkah pengamanan pendapatan negara dilakukan melalui kebijakan di bidang perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun kebijakan di bidang perpajakan antara lain: (1) optimalisasi perpajakan dengan memerhatikan iklim investasi; (2) mempertahankan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat; (3) meningkatkan produktivitas dan daya saing industri domestik; dan (4) mengendalikan konsumsi untuk barang kena cukai. Untuk mengamankan pendapatan perpajakan maka Pemerintah merancang kebijakan *tax amnesty/ voluntary disclosure* dan melakukan upaya keras atas penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai. Kebijakan insentif fiskal berupa *tax allowance*, *tax holiday*, dan pembebasan PPN untuk sektor industri strategis nasional juga tetap akan diberikan untuk menjaga daya saing industri dan mendorong produktivitas industri domestik. Selain itu, kebijakan PNBP diarahkan antara lain: (1) menahan turunnya *lifting* minyak dan gas serta melakukan efisiensi *cost recovery*; (2) optimalisasi penerimaan royalti (iuran produksi) dari pertambangan mineral dan batubara; (3) penyempurnaan berbagai peraturan PNBP, seperti revisi Undang-Undang PNBP dan Peraturan Pemerintah terkait tarif PNBP; dan (4) penerapan kebijakan *payout ratio* yang tepat untuk mendukung penguatan permodalan BUMN.

Pada sisi belanja pemerintah pusat, perubahan dalam RAPBNP tahun 2016 antara lain: (1) perubahan belanja akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro seperti perubahan pembayaran bunga utang dan subsidi; (2) penghematan dan pemotongan belanja K/L yang kurang produktif dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2016; (3) tambahan belanja, baik untuk kebutuhan mendesak maupun untuk kekurangan pembayaran beberapa komponen belanja hasil audit BPK; dan (4) tambahan belanja dalam rangka penyelesaian piutang pemerintah, seperti piutang PDAM.

Kebijakan anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam RAPBNP tahun 2016 pada dasarnya tetap mengacu pada APBN tahun 2016. Namun, dalam perkembangannya terjadi perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang mengakibatkan perubahan pada pendapatan

negara. Perubahan tersebut selanjutnya berakibat pada perubahan transfer ke daerah dan dana desa. Perubahan tersebut antara lain mencakup: (1) penurunan DBH seiring dengan penurunan penerimaan negara yang dibagihasilkan, di sisi lain terdapat kebijakan untuk mengalokasikan kurang bayar DBH dan kebijakan optimalisasi penggunaan sisa DBH SDA Kehutanan dari Dana Reboisasi; (2) penurunan DAK antara lain disebabkan oleh pemotongan alokasi DAK Fisik berdasarkan usulan pengurangan secara mandiri oleh masing-masing daerah, kebijakan untuk mengalokasikan tambahan DAK sebagai kompensasi atas kekurangan penyaluran triwulan IV tahun 2015, pengurangan dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD karena perubahan data jumlah guru yang mempunyai sertifikasi kependidikan, dan pengurangan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) dan bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) karena perbaikan data jumlah masyarakat miskin penerima bantuan kesehatan. Di samping itu, dialokasikan tambahan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah pada bidang jalan, jembatan, dan sarana pembangunan.

Kebijakan pembiayaan anggaran dalam RAPBNP tahun 2016 masih tetap mengacu pada kebijakan pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2016. Perubahan kebijakan pembiayaan anggaran dalam RAPBNP tahun 2016 antara lain: (1) mendukung program 35.000 MW melalui alokasi PMN kepada PT PLN (Persero); (2) mendukung pembangunan infrastruktur melalui alokasi pembiayaan investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN); (3) mendukung kebijakan penyelesaian permasalahan program kesejahteraan rakyat melalui PMN kepada BPJS Kesehatan dan alokasi cadangan pembiayaan untuk dana antisipasi pembayaran kepada masyarakat terdampak lumpur Sidoarjo; dan (4) pemanfaatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Selain itu, dalam RAPBNP tahun 2016 juga mengakomodir perubahan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan sejalan dengan perubahan volume belanja negara untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

Pada tahun 2016 pendapatan negara diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp88.045,0 miliar dari APBN tahun 2016. Penurunan tersebut terutama akibat penurunan PNBP sebesar Rp68.437,5 miliar yang disebabkan antara lain oleh: (1) penurunan harga minyak mentah Indonesia; (2) penurunan *lifting* migas; (3) penundaan kenaikan tarif royalti batu bara; dan (4) penurunan harga komoditas tertentu SDA nonmigas. Selanjutnya, penerimaan perpajakan juga diperkirakan turun sebesar Rp19.550,9 miliar dari APBN tahun 2016 menjadi Rp1.527.113,8 miliar yang terutama berasal dari turunnya penerimaan PPh migas dan PPN. Untuk mengamankan pendapatan negara terutama sektor perpajakan, Pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain: (1) peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP); (2) mengupayakan peningkatan *tax ratio* dan *tax buoyancy*; (3) peningkatan *tax coverage* melalui penggalan potensi perpajakan pada beberapa sektor unggulan; (4) penguatan dan perluasan basis data perpajakan; dan (5) pelaksanaan kebijakan *tax amnesty/voluntary disclosure*. Sementara itu, *tax ratio* RAPBNP tahun 2016 sebesar 12,08 persen, namun *tax ratio* dalam arti luas (termasuk PNBP SDA migas dan pertambangan umum) adalah sebesar 12,44 persen.

Belanja negara diproyeksikan mencapai Rp2.047.841,4 miliar, turun 2,3 persen dari pagu APBN tahun 2016. Belanja negara tahun 2016 meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.289.537,6 miliar dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp758.303,8 miliar. Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebesar Rp 743.548,1 miliar dan belanja non K/L sebesar Rp545.989,5 miliar. Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBNP tahun 2016 lebih rendah dari APBN tahun 2016 sejalan dengan kebijakan penghematan dan pemotongan belanja K/L, perubahan pagu penggunaan PNBP, dan perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN). Sedangkan penurunan dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus (DAK) memberikan kontribusi yang cukup besar atas penurunan alokasi transfer ke daerah dan dana desa.

Sejalan dengan penurunan belanja pemerintah pusat dalam RAPBNP tahun 2016, maka belanja berdasarkan klasifikasi fungsi juga mengalami penurunan, kecuali fungsi perumahan dan fasilitas umum yang mengalami peningkatan sebesar 9,2 persen, fungsi ketertiban dan keamanan sebesar 1,6 persen, dan fungsi pertahanan sebesar 0,4 persen.

Fungsi ekonomi masih mendominasi belanja pemerintah pusat dengan kontribusi sebesar 26,9 persen, sedangkan 73,1 persen tersebar pada 10 fungsi lainnya.

Pokok-pokok perubahan pembiayaan anggaran meliputi, antara lain: (1) PMN kepada BUMN diperkirakan meningkat Rp13.560,0 miliar; (2) pembiayaan investasi kepada BLU LMAN diperkirakan sebesar Rp16.000,0 miliar; (3) PMN kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp6.827,9 miliar; (4) pemanfaatan SAL sebesar Rp 19.011,1 miliar; dan (5) tambahan penerbitan SBN (neto) diperkirakan Rp57.759,2 miliar. Postur ringkas RAPBNP tahun 2016 disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel I-2 Ringkasan LKPP Unaudited 2015, APBN 2016, dan RAPBN 2016 (Miliar Rupiah)

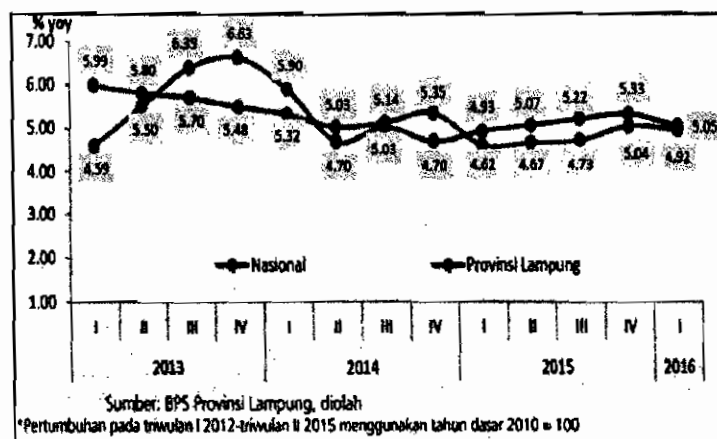
Uraian	2015	2016	
	LKPP Unaudited	APBN	RAPBNP
A. Pendapatan Negara	1,505,388,1	1,882,545,8	1,734,500,9
I. Pendapatan Dalam Negeri	1,494,115,4	1,820,514,1	1,732,525,7
1. Pendapatan Pajak	1,240,418,5	1,546,664,6	1,527,113,8
2. Pajak Pertambahan Nilai	253,696,9	273,849,4	205,411,9
3. Pajak Bumi dan Bangunan	11,272,7	2,031,8	1,975,2
II. Pendapatan Hibah			
B. Belanja Negara	1,797,589,2	2,095,724,7	2,047,841,4
I. Belanja Pemerintah Pusat	1,174,510,8	1,325,551,4	1,289,537,6
1. Belanja K/L	725,633,1	784,125,7	743,548,6
2. Belanja Non K/L	448,877,7	541,425,7	545,989,5
a. Subsidi	185,971,1	182,571,1	188,668,5
b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	623,008,0	770,173,3	758,303,8
c. Transfer ke Badan Usaha	602,241,8	723,191,2	711,321,8
d. Transfer ke Lembaga	582,914,4	700,429,4	687,509,9
e. Transfer ke Pemda	430,941,2	491,498,1	486,833,5
f. Transfer ke Lembaga	151,973,1	208,931,3	200,676,4
g. Transfer ke Lembaga	0,0	5,000,0	5,000,0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa			
1. Transfer ke Daerah	17,663,0	17,761,9	18,811,9
2. Dana Desa	20,766,2	46,982,1	46,982,1
C. Keseimbangan Primer	(136,192,1)	(88,238,2)	(121,609,0)

D. Surplus / (Defisit) Anggaran	(292,201,1) (2,53)	(273,178,9) (2,15)	(313,340,6) (2,48)
% Defisit terhadap PDB			
E. Pembiayaan	318,837,8	273,178,9	313,340,6
I. Pembiayaan Dalam Negeri	307,807,3	272,780,7	315,867,5
II. Pembiayaan Luar Negeri	11,030,5	398,2	(2,526,9)

1.3.6. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah

Seperti yang digambarkan Grafik 1.1, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 5.05% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 4.92% (yoy) pada periode pengamatan yang sama.

Grafik I-1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional (Persen yoy)



Dari sisi Penawaran (Tabel 1.3), pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,56 persen, diikuti oleh Konstruksi 19,07 persen, dan Informasi dan Komunikasi sebesar 11,28 persen. Pertumbuhan pada sektor Pengadaan Air, Perdagangan Besar, Transportasi, Akomodasi, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan tumbuh pada kisaran 5 hingga 10 persen. Sementara, pertumbuhan sektor Pertanian (yang melibatkan sekitar 48 persen penduduk yang bekerja) hanya tumbuh sebesar 1,11 persen.

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	PENDIDIKAN				
	Program Pendidikan Non Formal	6	1,200,000,000.00	6	984,750,000.00
	PERHUBUNGAN				
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	8	3,760,000,000.00	9	2,662,550,000.00
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	2	850,000,000.00	2	96,000,000.00
	Program peningkatan pelayanan angkutan	10	2,162,400,000.00	10	2,671,443,000.00
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1	50,000,000,000.00	1	50,000,000,000.00
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	4	3,900,000,000.00	4	3,175,000,000.00
	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi Serta Meteorologi dan Geofisika*	1	150,000,000.00	1	122,000,000.00
	Program Antisipasi dan Pengendalian Keadaan Rescue*	1	75,000,000.00	1	71,000,000.00
		56	66,625,000,000.00	57	63,684,500,000.00
	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	1,094,800,000.00	14	950,800,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	260,000,000.00	4	245,500,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	49,500,000.00	1	49,500,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	70,000,000.00	1	45,000,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	175,000,000.00	3	164,995,400.00
	WAJIB				
	LINGKUNGAN HIDUP				
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1	200,000,000.00	1	105,000,000.00
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	10	2,915,200,000.00	10	2,312,398,000.00
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1	275,000,000.00	1	173,000,000.00
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya	2	650,000,000.00	2	492,000,000.00

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Alam				
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	4	475,000,000.00	4	384,000,000.00
	Pengembangan Sumber-sumber Alternatif Pendanaan Lingkungan	1	50,000,000.00	1	43,000,000.00
		42	6,214,500,000.00	42	4,965,193,400.00
	Badan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Daerah				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	1,164,826,200.00	14	1,054,141,200.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	420,173,800.00	4	375,736,600.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	59,000,000.00	1	26,500,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	158,600,000.00	2	96,100,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	211,055,000.00	1	101,055,000.00
	WAJIB				
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan	4	2,430,000,000.00	4	2,251,140,000.00
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pencegahan dan Penanganan Trafficking, KDRT, dan Korban Pelecehan Seksual	4	1,810,000,000.00	4	1,663,000,000.00
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	2	551,945,000.00	2	406,125,000.00
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	4	600,000,000.00	4	462,220,000.00
	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	3	594,400,000.00	3	400,508,000.00
		39	8,000,000,000.00	39	6,836,525,800.00

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Dinas Sosial				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	991,500,000.00	13	971,900,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	65,000,000.00	3	65,000,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4	160,580,000.00	4	121,160,000.00
	WAJIB				
	SOSIAL				
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	400,000,000.00	1	324,714,500.00
	Program pembinaan anak terlantar	4	4,544,520,000.00	4	4,458,520,000.00
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	2	1,286,300,000.00	2	1,331,300,000.00
	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	1	1,469,100,000.00	1	1,469,100,000.00
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	2	908,000,000.00	2	908,000,000.00
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	3	375,000,000.00	3	375,000,000.00
	Program Keluarga Harapan	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00
		34	10,250,000,000.00	34	10,074,694,500.00
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	2,507,600,000.00	13	1,920,239,800.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	595,500,000.00	3	450,000,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	135,900,000.00	1	50,230,000.00
	WAJIB				
	KETENAGAKERJAAN				
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan dan Pemagangan	6	1,900,000,000.00	10	16,270,576,000.00

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	2	350,000,000.00	2	261,200,000.00
	Program Pengembangan Kewirusahaan	1	150,000,000.00	1	122,180,000.00
	Program Pengembangan data dan informasi	3	361,000,000.00	3	259,435,100.00
	Program Pengembangan Hubungan Industrial	1	350,000,000.00	1	281,500,000.00
	Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	2	250,000,000.00	2	188,440,000.00
	Program Pembinaan dan Pengujian K3	2	450,000,000.00	2	384,680,000.00
	PILIHAN				
	KETRANSMIGRASIAN				
	Program Pengembangan Masyarakat melalui Transmigrasi	3	350,000,000.00	3	262,500,000.00
	Program Pengembangan Museum Transmigrasi menjadi Pusat Layanan Informasi, Edukasi dan Sejarah Ketransmigrasian	3	450,000,000.00	3	272,170,000.00
	Program Pengembangan Kawasan KTM	3	350,000,000.00	3	221,617,200.00
		43	8,200,000,000.00	47	20,944,768,100.00
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	889,000,000.00	12	714,549,200.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	228,000,000.00	2	170,754,800.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	95,000,000.00	3	46,715,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6	303,000,000.00	6	267,706,000.00
	WAJIB				
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	1	195,000,000.00	1	128,721,634.00
	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	10	1,153,000,000.00	10	783,707,000.00

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM	3	740,000,000.00	3	740,000,000.00
	Program Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM	1	100,000,000.00	1	25,275,000.00
	Program Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM	0	0	1	2,000,000,000.00
	Program peningkatan dan pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	7	865,000,000.00	7	423,508,000.00
		45	4,568,000,000.00	46	5,300,936,634.00
	Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	1,295,000,000.00	8	1,150,150,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	160,000,000.00	2	85,000,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	100,000,000.00	1	66,800,000.00
	WAJIB				
	PENANAMAN MODAL				
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi-	4	1,695,000,000.00	4	1,558,800,000.00
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	5	1,000,000,000.00	5	798,700,000.00
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	5	950,000,000.00	5	818,288,000.00
		25	5,200,000,000.00	25	4,477,738,000.00
	Dinas Pemuda dan Olahraga				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	2,121,770,000.00	12	1,965,565,500.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6	543,675,000.00	6	420,550,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	236,555,000.00	3	160,178,400.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	125,750,000.00	2	64,461,000.00

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	WAJIB				
	PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	5	1,610,000,000.00	5	1,240,087,600.00
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	1	155,000,000.00	1	0
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	4	1,790,000,000.00	4	1,262,217,500.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	2	300,000,000.00	2	111,000,000.00
	Program Pelayanan Manajemen Keolahragaan, Kepemudaan dan Kepramukaan	5	317,250,000.00	5	162,434,000.00
		40	7,200,000,000.00	40	5,386,494,000.00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15	1,193,968,000.00	15	1,014,168,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	280,612,000.00	3	277,612,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	13,980,000.00	1	7,480,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	255,000,000.00	3	251,000,000.00
	WAJIB				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				
	Program Pembinaan Idiologi dan pengembangan wawasan kebangsaan	3	1,160,000,000.00	3	1,032,000,000.00
	Program Penanganan Konflik	2	806,440,000.00	2	658,440,000.00
	Program Pengendalian Stabilitas Daerah	3	770,000,000.00	3	583,000,000.00
	Program Pendidikan Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga	4	695,000,000.00	4	457,500,000.00
		35	5,200,000,000.00	35	4,306,200,000.00
	Satuan Polisi Pamong Praja				

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Daerah				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	20	17,526,914,900.00	20	17,046,764,900.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	794,330,000.00	3	794,330,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2	1,186,825,000.00	2	1,186,825,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6	1,139,605,000.00	6	1,404,099,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	170,519,800.00	1	156,429,800.00
	WAJIB				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				
	Program penegakan Peraturan Perundang undangan	5	584,345,000.00	5	498,925,000.00
	Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	4	283,522,800.00	4	244,602,800.00
	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)	9	4,223,937,500.00	9	3,754,343,500.00
		50	25,910,000,000.00	50	25,086,320,000.00
	Biro Administrasi Pembangunan				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4	700,000,000.00	4	597,000,000.00
	WAJIB				
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH				
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2	650,000,000.00	2	645,000,000.00
	Program Koordinasi Pembangunan Ekonomi dan Kemitraan	1	175,000,000.00	1	147,500,000.00
	Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan	9	975,000,000.00	9	703,500,000.00
	Pelayanan Administrasi	1	150,000,000.00	1	132,000,000.00

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Perkantoran				
		17	2,650,000,000.00	17	2,225,000,000.00
	Biro Bina Mental				
	WAJIB				
	PENDIDIKAN				
	Program peningkatan koordinasi sumber daya pendidikan	4	625,000,000.00	4	625,000,000.00
	SOSIAL				
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Keagamaan	1	8,344,440,000.00	1	8,344,440,000.00
	KEBUDAYAAN				
	Program Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00
	PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	Program Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan	2	410,830,000.00	2	410,830,000.00
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH				
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	4	250,000,000.00	4	250,000,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Biro	4	430,000,000.00	4	430,000,000.00
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Keagamaan	7	33,814,730,000.00	7	33,533,730,000.00
	Program Peningkatan Apresiasi Terhadap Kesenian dan Budaya	4	725,000,000.00	4	725,000,000.00
		27	44,800,000,000.00	27	44,519,000,000.00
	Biro Bina Sosial				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	200,000,000.00	1	215,000,000.00
	WAJIB				
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1	70,000,000.00	1	51,500,000.00
	SOSIAL				
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	4	550,000,000.00	4	509,000,000.00
	KETENAGAKERJAAN				
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1	150,000,000.00	1	120,000,000.00
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH				
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Biro	4	250,000,000.00	4	220,000,000.00
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	3	480,000,000.00	3	349,000,000.00
		14	1,700,000,000.00	14	1,464,500,000.00
	Biro Hukum				
	WAJIB				
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH				
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2	415,000,000.00	2	393,000,000.00
	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2	190,000,000.00	2	143,500,000.00
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	9	1,645,000,000.00	9	1,481,500,000.00
		13	2,250,000,000.00	13	2,018,000,000.00
	Biro Humas & Protokol				
	WAJIB				
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH				
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	4	1,510,000,000.00	4	1,959,500,000.00

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1	650,000,000.00	1	950,000,000.00
	Program pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah	7	2,235,800,000.00	7	2,906,800,000.00
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1	129,200,000.00	1	129,200,000.00
	Distribusi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung	3	1,725,000,000.00	3	3,297,500,000.00
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	Program kerjasama informasi dan media massa	1	250,000,000.00	2	302,000,000.00
		17	6,500,000,000.00	18	9,545,000,000.00
	Biro Keuangan				
	WAJIB				
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH				
	Program Peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan Daerah	2	1,050,000,000.00	2	649,400,000.00
	Program Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	9	2,300,000,000.00	9	691,530,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah	16	4,199,000,000.00	16	3,143,290,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan	14	3,500,000,000.00	14	2,544,623,000.00
	Program Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	6	2,435,000,000.00	6	2,279,130,000.00
	Program Peningkatan Pengelolaan Investasi dan Penyertaan Modal serta PPK-BLUD	2	500,000,000.00	2	70,500,000.00
		49	13,984,000,000.00	49	9,378,473,000.00
	Biro Organisasi				
	WAJIB				
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH				

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Program Penataan Kelembagaan	4	1,000,000,000.00	4	955,000,000.00
	Program Ketatalaksanaan	4	400,000,000.00	4	241,500,000.00
	Program Pendayagunaan Kinerja Aparatur	4	400,000,000.00	4	270,500,000.00
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	3	2,010,000,000.00	3	1,831,000,000.00
		15	3,810,000,000.00	15	3,298,000,000.00
	Biro Otonomi Daerah				
	WAJIB				
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH				
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	2	137,500,000.00	2	208,112,000.00
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	6	566,000,000.00	6	749,000,000.00
	Program pembinaan & Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	4	443,500,000.00	4	473,000,000.00
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	3	965,600,000.00	3	1,050,721,400.00
	Program pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah	1	240,400,000.00	1	305,100,000.00
	Program Pengembangan Data / Informasi	4	647,000,000.00	4	1,373,167,000.00
		20	3,000,000,000.00	20	4,159,100,400.00
	Biro Perekonomian				
	WAJIB				
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH				
	Program Koordinasi Pembangunan Ekonomi dan Kemitraan	9	575,000,000.00	7	523,900,000.00
	Program Pengembangan investasi untuk mendukung peningkatan ekonomi daerah	5	350,000,000.00	4	323,000,000.00
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	5	230,000,000.00	3	219,500,000.00
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	1	100,000,000.00	1	76,000,000.00

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Biro	3	690,000,000.00	3	645,716,000.00
	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan dan Kelistrikan	1	80,000,000.00	1	57,000,000.00
	Program Kerjasama Bidang Pendidikan dan Pengembangan Badan usaha Milik Rakyat (BUMRa)	5	225,000,000.00	2	225,000,000.00
		29	2,250,000,000.00	21	2,070,116,000.00
	Biro Perlengkapan dan Aset				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	800,000,000.00	2	386,760,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6	18,917,000,000.00	6	18,500,235,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	894,240,000.00	2	872,715,000.00
	WAJIB				
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH				
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	26	13,933,260,000.00	26	13,684,790,000.00
		36	34,544,500,000.00	36	33,444,500,000.00
	Biro Tata Pemerintahan Umum				
	WAJIB				
	PERTANAHAN				
	Program Fasilitas Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	1	69,000,000.00	1	69,000,000.00
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	2	574,000,000.00	2	574,000,000.00
	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
	Program Penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil	3	170,000,000.00	3	370,000,000.00

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH				
	Program Peningkatan Peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah	3	633,000,000.00	3	633,000,000.00
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	4	526,000,000.00	4	526,000,000.00
	Penyelesaian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	1	54,000,000.00	1	54,000,000.00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	224,000,000.00	2	321,000,000.00
		16	2,250,000,000.00	16	2,547,000,000.00
	Biro Umum				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	18	23,398,000,000.00	18	32,969,700,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10	13,865,000,000.00	10	15,815,000,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	375,000,000.00	1	515,000,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	200,000,000.00	1	400,000,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	325,000,000.00	1	325,000,000.00
	WAJIB				
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH				
	Program Peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan Daerah	1	475,000,000.00	1	775,000,000.00
	Program Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	1	440,000,000.00	1	740,000,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	4	2,850,000,000.00	3	4,992,000,000.00
	Program pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah	13	6,872,000,000.00	13	10,109,500,000.00

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Program Ketatalaksanaan	2	200,000,000.00	2	307,500,000.00
		53	49,500,000,000.00	52	67,448,700,000.00
	SEKRETARIAT DPRD				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	19	12,438,172,000.00	19	16,116,466,500.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12	8,109,756,000.00	12	9,482,963,800.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	1,952,250,000.00	1	1,952,250,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	2,228,944,000.00	2	2,771,899,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7	2,286,592,000.00	7	3,036,439,400.00
	WAJIB				
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH				
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	14	52,386,618,000.00	14	69,624,540,000.00
	Program pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah	6	5,597,668,000.00	6	7,918,448,500.00
		61	85,000,000,000.00	61	110,903,007,200.00
	Dinas Pendapatan Daerah				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	8,106,486,348.00	9	7,916,486,348.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	2,872,799,752.00	4	2,722,799,752.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	437,974,906.00	2	276,474,906.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	505,000,000.00	3	319,254,900.00
	WAJIB				
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH				

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	464,001,117.00	2	329,931,117.00
	Program Peningkatan Pelayanan Pajak	6	1,678,000,000.00	6	1,194,000,000.00
	Program Peningkatan Pelayanan Pendapatan Non Pajak	4	930,380,000.00	4	803,380,000.00
	Program Peningkatan Pelayanan Teknologi Informasi Pendapatan	8	7,035,135,420.00	8	6,591,635,420.00
	Program Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Pendapatan Daerah	5	1,000,722,457.00	5	632,336,457.00
	Program Pengembangan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah	8	1,800,000,000.00	8	1,412,000,000.00
		51	24,830,500,000.00	51	22,198,298,900.00
	Inpektorat Provinsi				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	984,964,500.00	15	996,699,600.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	288,391,170.00	3	288,391,170.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	0	1	0
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	323,594,300.00	2	392,104,100.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	48,771,000.00	1	62,858,500.00
	WAJIB				
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH				
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	22	4,232,136,730.00	22	4,197,676,330.00
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur pengawasan	2	122,142,300.00	2	62,270,300.00
		45	6,000,000,000.00	46	6,000,000,000.00

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	2,703,432,700.00	9	2,445,431,250.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	1,245,865,000.00	3	1,191,515,940.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	40,356,000.00	1	15,672,500.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4	235,274,000.00	3	211,924,000.00
	WAJIB				
	KEBUDAYAAN				
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1	184,870,000.00	1	122,870,000.00
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2	761,768,800.00	2	558,780,800.00
	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	1	201,360,000.00	1	165,027,000.00
	PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1	7,494,367,000.00	1	7,106,240,510.00
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH				
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1	175,040,000.00	1	132,067,500.00
	Program Peningkatan Pelayanan BLUD Unit Kerja Bagian Umum	1	1,300,000,000.00	1	1,300,000,000.00
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	3	2,612,140,000.00	3	2,384,461,000.00
	Program Pelayanan Masyarakat Terlantar di luar daerah	1	172,483,000.00	1	141,483,000.00
	PILIHAN				
	PERDAGANGAN				
	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	1	173,043,500.00	1	125,893,500.00
		30	17,300,000,000.00	28	15,901,367,000.00
	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK				

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	INDONESIA				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	843,100,000.00	11	709,354,116.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	118,900,000.00	3	89,175,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	246,000,000.00	3	187,880,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	100,000,000.00	1	96,000,000.00
	WAJIB				
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH				
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kelembagaan	7	1,192,000,000.00	7	829,348,500.00
		25	2,500,000,000.00	25	1,911,757,616.00
	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15	1,740,814,000.00	15	1,710,814,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	176,000,000.00	4	176,000,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2	35,000,000.00	2	35,000,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	51,186,000.00	3	51,186,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	145,000,000.00	5	144,380,000.00
	WAJIB				
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH				
	Program Ketatalaksanaan	2	177,000,000.00	2	48,350,000.00
	Program Kerjasama Antar Lembaga	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00
	KOMUNIKASI DAN				

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	INFORMATIKA				
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	5	140,000,000.00	5	140,000,000.00
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	3	265,000,000.00	3	262,400,000.00
	Program Peningkatan sistem Monitoring dan Evaluasi	2	240,000,000.00	2	240,000,000.00
		42	3,000,000,000.00	42	2,838,130,000.00
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16	2,000,439,000.00	16	2,059,179,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	258,000,000.00	4	394,000,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	137,500,000.00	1	137,500,000.00
	Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS	1	185,876,600.00	1	177,676,600.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	195,080,000.00	2	150,080,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	180,000,000.00	2	162,000,000.00
	WAJIB				
	PENDIDIKAN				
	Program Pendidikan Kedinasan	1	180,000,000.00	1	180,000,000.00
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH				
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	14	4,373,305,400.00	14	3,529,825,400.00
	Peningkatan kualitas aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintah	2	206,104,000.00	2	186,104,000.00
		43	7,716,305,000.00	43	6,976,365,000.00
	Kantor Sandi Daerah				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	526,730,000.00	11	430,770,000.00

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	91,000,000.00	3	86,000,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	13,500,000.00	1	0
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	265,770,000.00	3	228,970,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	30,000,000.00	2	22,000,000.00
	WAJIB				
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH				
	Program pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah	1	73,000,000.00	1	69,870,000.00
		21	1,000,000,000.00	21	837,610,000.00
	Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	1,153,000,000.00	14	1,083,000,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	517,000,000.00	3	517,000,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	80,000,000.00	2	72,500,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	165,000,000.00	3	151,000,000.00
	WAJIB				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4	2,550,000,000.00	4	2,403,300,000.00
	Program Kedaruratan dan Logistik	5	1,400,000,000.00	5	1,332,000,000.00
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	5	9,212,578,000.00	5	9,114,878,000.00
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH				
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	2	185,000,000.00	2	157,000,000.00

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
		38	15,262,578,000.00	38	14,830,678,000.00
	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	1,071,000,000.00	14	1,017,319,500.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	185,000,000.00	2	171,004,500.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	69,000,000.00	2	63,334,000.00
	WAJIB				
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH				
	Program Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Monitoring Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	2	110,000,000.00	2	101,500,000.00
	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Penyuluh dan Petani	5	705,000,000.00	5	528,250,000.00
	Program Pengembangan Jejaring Kerjasama Agribisnis dan Kemitraan Agribisnis Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	6	1,109,000,000.00	6	973,465,000.00
	Program Penataan, Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan	5	3,615,000,000.00	5	3,263,642,000.00
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan	6	1,007,250,000.00	6	772,180,000.00
	PILIHAN				
	PERTANIAN				
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1	828,750,000.00	1	758,796,000.00
		43	8,700,000,000.00	43	7,649,491,000.00
	Badan Pendidikan dan Latihan Daerah				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	17	1,738,174,930.00	17	1,682,659,930.00

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8	1,609,671,020.00	8	1,025,021,020.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10	8,060,660,000.00	10	7,401,902,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	128,675,550.00	3	114,265,550.00
	WAJIB				
	PENDIDIKAN				
	Program Pendidikan Kedinasan	1	145,000,000.00	1	102,480,000.00
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	2	183,306,000.00	2	176,219,000.00
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH				
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	5	576,050,000.00	5	419,702,000.00
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00
	Monitoring dan Pembinaan Kediklatan	1	150,000,000.00	1	79,000,000.00
	Program Pembinaan dan Permasayarakatan Olahraga	1	39,600,000.00	1	24,600,000.00
		49	12,641,137,500.00	49	11,035,849,500.00
	Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	1,335,000,000.00	9	1,301,158,500.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	150,000,000.00	2	207,666,600.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4	65,000,000.00	4	55,112,000.00
	WAJIB				
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH				
	Program Peningkatan Layanan Pengadaan	4	625,000,000.00	4	322,842,500.00

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Database dan Pelaporan Barang/Jasa	3	325,000,000.00	3	281,632,500.00
		21	2,500,000,000.00	22	2,168,412,100.00
	Badan Ketahanan Pangan Daerah				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	762,200,000.00	12	607,831,250.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	125,000,000.00	3	119,000,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2	6,000,000.00	2	3,600,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	91,750,000.00	2	77,007,000.00
	WAJIB				
	KETAHANAN PANGAN				
	Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan	31	5,515,050,000.00	31	4,375,466,750.00
		50	6,500,000,000.00	50	5,182,905,000.00
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	1,273,690,000.00	14	1,170,190,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	110,000,000.00	2	100,000,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	41,850,000.00	1	0
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	50,000,000.00	1	47,000,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	231,000,000.00	2	91,500,000.00
	WAJIB				
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	3	3,950,000,000.00	3	3,837,000,000.00

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Pedesaan				
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	3	475,000,000.00	3	225,000,000.00
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	4	918,460,000.00	4	718,360,000.00
	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PERKUATAN DESA, ADMINISTRASI DAN KELEMBAGAAN DESA	2	1,400,000,000.00	2	1,256,100,000.00
	PROGRAM PEMANTAPAN KOORDINASI PROG. KHUSUS LINTAS SEKTORAL	2	400,000,000.00	2	320,788,000.00
	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENERAPAN & PEMB. TTG, SDA, DAN LH	3	900,000,000.00	3	553,500,000.00
		37	9,750,000,000.00	37	8,319,438,000.00
	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15	1,317,700,000.00	15	1,207,140,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	630,000,000.00	3	630,000,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	54,000,000.00	1	54,000,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	160,000,000.00	2	120,000,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	176,000,000.00	3	91,515,000.00
	WAJIB				
	KEARSIPAN				
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	2	70,000,000.00	2	39,637,000.00
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	4	110,000,000.00	4	100,754,000.00
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	5	99,150,000.00	5	83,587,000.00
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	6	743,550,000.00	6	699,050,000.00

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	PERPUSTAKAAN				
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	8	539,600,000.00	8	473,072,000.00
		49	3,900,000,000.00	49	3,498,755,000.00
	Dinas Komunikasi dan Informatika				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	2,320,536,000.00	10	2,122,036,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	392,466,200.00	2	372,466,200.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	52,250,000.00	1	52,250,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	332,916,000.00	2	221,600,600.00
	WAJIB				
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	8	878,000,000.00	8	643,500,000.00
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	1	61,844,000.00	1	33,159,000.00
	Program kerjasama informasi dan media massa	9	3,868,000,000.00	9	3,559,807,000.00
	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	4	2,458,987,800.00	4	2,319,562,800.00
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga komunikasi	2	531,000,000.00	2	501,600,000.00
	Peningkatan Kapasitas Updating Situs Resmi Mitra Praja Utama (MPU)	1	34,000,000.00	1	24,000,000.00
		40	10,930,000,000.00	40	9,849,981,600.00
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1,812,720,000.00	1	1,627,720,000.00

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	394,000,000.00	1	348,000,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	451,000,000.00	3	226,000,000.00
	PILIHAN				
	PERTANIAN				
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	7	854,000,000.00	7	587,000,000.00
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	21	9,790,516,000.00	21	8,546,380,000.00
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	14	3,423,764,000.00	14	2,613,763,000.00
	Program Peningkatan Pelayanan Mutu	4	1,174,000,000.00	4	655,872,400.00
		51	17,900,000,000.00	51	14,604,735,400.00
	Dinas Perkebunan				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	1,551,837,000.00	13	1,286,087,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	555,000,000.00	5	488,578,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	88,163,000.00	2	60,163,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	50,000,000.00	1	32,277,000.00
	PILIHAN				
	PERTANIAN				
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	4	1,910,000,000.00	4	1,426,688,500.00
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	4	335,000,000.00	4	205,625,000.00
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	4	1,730,000,000.00	4	881,014,000.00
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	7	580,000,000.00	7	454,343,000.00
		40	6,800,000,000.00	40	4,834,775,500.00
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				
	NON URUSAN				

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	19	1,898,050,000.00	18	1,726,311,830.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	125,000,000.00	1	125,000,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	0.00	0	0.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	50,000,000.00	2	35,000,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4	440,000,000.00	3	328,808,245.00
	PILIHAN				
	PERTANIAN				
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	7	504,150,000.00	3	465,722,000.00
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	12	552,500,000.00	6	413,441,100.00
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	14	4,804,900,000.00	10	4,615,316,000.00
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	6	765,400,000.00	6	521,341,025.00
	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	3	430,000,000.00	2	402,254,000.00
	Program peningkatan konsumsi pangan Hewani yang aman, sehat, utuh dan Halal (ASUH)	2	50,000,000.00	1	31,805,800.00
		74	9,620,000,000.00	52	8,665,000,000.00
	Dinas Kehutanan				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	790,586,000.00	8	757,586,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	731,385,000.00	3	706,935,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	245,514,000.00	1	228,314,000.00
	PILIHAN				
	KEHUTANAN				
	Program rehabilitasi hutan dan lahan	2	5,694,335,000.00	2	3,008,335,000.00
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	3	525,000,000.00	3	414,000,000.00

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Program perencanaan dan pengembangan hutan	6	1,325,000,000.00	6	903,340,460.00
	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	4	800,000,000.00	4	498,630,540.00
		27	10,111,820,000.00	27	6,517,141,000.00
	Dinas Pertambangan dan Energi				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	2,660,159,000.00	9	2,175,959,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	828,175,000.00	3	575,725,000.00
	WAJIB				
	PENDIDIKAN				
	Program Pendidikan Masyarakat	4	611,495,000.00	4	423,095,000.00
	PILIHAN				
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	5	922,646,000.00	5	659,946,000.00
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	3	15,527,075,000.00	3	15,238,575,000.00
	Program Peningkatan Pendapatan Daerah dari Hasil Pertambangan	2	900,000,000.00	2	492,000,000.00
	Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Potensi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan dan Energi Alternatif	2	6,697,100,000.00	2	6,615,600,000.00
	Peningkatan Kapasitas sistem Pelaporan dan Evaluasi	1	200,000,000.00	1	150,500,000.00
	Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Mineral, Panas Bumi, dan Geologi	4	1,450,000,000.00	4	710,000,000.00
	Pengembangan Data dan Informasi Bidang Pertambangan dan Energi	2	303,350,000.00	2	243,350,000.00
		35	30,100,000,000.00	35	27,284,750,000.00
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16	2,425,000,000.00	16	2,270,000,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	275,000,000.00	3	155,000,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00
	PILIHAN				
	PARIWISATA				
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	8	7,080,000,000.00	8	6,700,000,000.00
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	3	2,810,000,000.00	3	780,000,000.00
	Program Pengembangan Kemitraan	5	1,379,000,000.00	5	1,434,000,000.00
	EKONOMI KREATIF				
	PROGRAM EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA	4	2,146,000,000.00	4	1,936,000,000.00
	PROGRAM EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA DESAIN DAN IPTEK	1	300,000,000.00	1	300,000,000.00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KREATIFITAS SUMBER DAYA MANUSIA	2	185,000,000.00	2	0
		43	16,700,000,000.00	43	13,675,000,000.00
	Dinas Kelautan dan Perikanan				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	4,099,410,000.00	13	3,644,240,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	1,691,200,000.00	4	1,526,610,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	1	185,610,000.00
	PILIHAN				
	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	4	3,975,000,000.00	4	11,463,150,000.00
	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	2	2,332,000,000.00	2	2,347,878,000.00
	Program pengembangan budidaya perikanan	18	2,758,100,000.00	19	4,446,185,300.00
	Program pengembangan perikanan tangkap	14	7,077,350,000.00	15	11,054,855,400.00

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	11	1,973,100,000.00	11	1,325,195,000.00
	Program Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Monitoring Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan	2	583,000,000.00	2	547,340,000.00
	Program Pengembangan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan	3	893,840,000.00	3	841,840,000.00
		71	25,383,000,000.00	74	37,382,903,700.00
	Dinas Perdagangan				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	932,500,000.00	11	972,400,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	220,000,000.00	3	200,500,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5	182,500,000.00	5	110,650,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6	250,000,000.00	6	233,200,000.00
	WAJIB				
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	2	95,000,000.00	2	82,000,000.00
	PILIHAN				
	PERDAGANGAN				
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	6	350,000,000.00	6	235,500,000.00
	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	6	535,000,000.00	6	462,770,000.00
	Program Peningkatan dan Pengembangan Kalibrasi dan Tertib Ukur	6	355,000,000.00	6	249,750,000.00
	Program Peningkatan Distribusi dan Pemasaran Komoditi Provinsi Lampung	6	1,000,000,000.00	6	681,700,000.00
	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	5	705,000,000.00	5	588,500,000.00
	Program Pengembangan dan Peningkatan Sertifikasi dan Pengujian Mutu Barang	6	350,000,000.00	6	235,600,000.00

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
		62	4,975,000,000.00	62	4,052,570,000.00
	Dinas Perindustrian				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	1,104,860,000.00	12	1,103,043,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	239,170,000.00	3	307,945,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5	412,583,000.00	5	348,264,700.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	170,992,000.00	3	206,559,000.00
	WAJIB				
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	1	77,960,000.00	1	77,960,000.00
	PILIHAN				
	INDUSTRI				
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	9	2,289,897,000.00	9	2,162,788,000.00
	Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	4	901,538,000.00	4	888,335,000.00
		37	5,197,000,000.00	37	5,094,894,700.00
	TOTAL	2,321	2,229,444,373,000.00	2,292	2,174,643,810,808.00

BAB IV PENUTUP

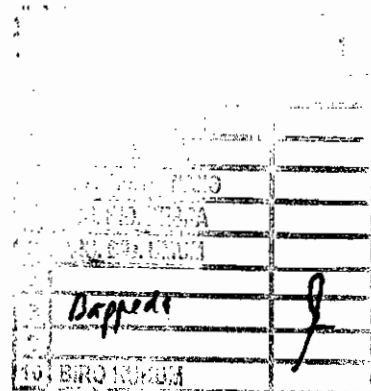
Demikian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016 disusun untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2016.

Bandar Lampung,

2016

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO



BAB IV PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016 disusun untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2016.

Bandar Lampung,

2016

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

BAB IV PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016 disusun untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2016.

Bandar Lampung,

2016

GOVERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

BAB IV PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016 disusun untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2016.

Bandar Lampung,

2016

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	4	118,685,150,625	
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	23,107,714,375	
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	1	196,481,201,629	
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1	697,272,500	
	RS. JIWA DAERAH	13	17,001,272,500	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1,723,542,800	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3	102,816,000	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1	25,400,000	
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	3	6,555,188,650	
	Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan	2	108,060,000	
	Program kebijakan dan manajemen Pembangunan Kesehatan	1	467,465,050	
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	1	8,000,000,000	
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1	18,800,000	
	Dinas Pengairan dan Pemukiman	1	1,631,000,000	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1	1,631,000,000	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	441,181,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3	70,500,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	50,000,000	
	Program Perencanaan Tata Ruang	1	105,190,000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN III 2016	%
	Program Pengembangan data/informasi	1	100,000,000	
	Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan	2	115,491,000	
	Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	1	74,530,000	
	Penelitian dan Pengembangan	1	74,530,000	
	Dinas Perhubungan	10	4,159,750,000	
	Program Pendidikan Non Formal	6	984,750,000	
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	4	3,175,000,000	
	Badan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Daerah	8	1,671,328,000	
	Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan	1	456,500,000	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pencegahan dan Penanganan Trafficking, KDRT, dan Korban Pelecehan Seksual	2	588,000,000	
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	4	462,220,000	
	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	1	164,608,000	
	Dinas Pemuda dan Olahraga	9	2,455,715,100	
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	4	1,193,497,600	
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	1	0	
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	4	1,262,217,500	
	Biro Bina Mental	6	11,085,235,000	
	Program peningkatan koordinasi sumber daya pendidikan	2	450,000,000	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Keagamaan	4	10,635,235,000	
	Biro Bina Sosial	8	641,500,000	
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1	51,500,000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	3	121,000,000	
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1	120,000,000	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	3	349,000,000	
	Biro Humas & Protokol	1	950,000,000	
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1	950,000,000	
	Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta	2	7,247,723,510	
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1	7,106,240,510	
	Program Pelayanan Masyarakat Terlantar di luar daerah	1	141,483,000	
	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	1	758,796,000	
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1	758,796,000	
	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	11	1,172,122,000	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	6	699,050,000	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	5	473,072,000	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	3	2,750,984,000	
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	2	2,671,000,000	
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1	79,984,000	
5	Memantapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur	1339	473.183.601,211	21.76%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20	5,108,662,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	2,991,192,000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6	596,750,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	0	
	Program Pendidikan Menengah	1	1,520,720,000	
	Dinas Kesehatan	18	5,969,725,200	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	3,742,947,100	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	2,226,778,100	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	0	
	RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK	2	3,773,090,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	3,773,090,000	
	RS. JIWA DAERAH	3	809,248,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	458,950,000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	104,742,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	245,556,000	
	Dinas Bina Marga	28	11,793,315,280	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	8,140,121,900	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6	2,441,814,800	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	0	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	407,980,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	803,398,580	
	Dinas Pengairan dan Pemukiman	30	11,115,750,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	7,238,500,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	3,133,000,000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	251,250,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	75,000,000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7	192,000,000	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	2	226,000,000	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	40	7,096,021,800	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	1,769,800,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	1,055,600,000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	52,000,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	92,394,000	
	Program Pengembangan data/informasi	2	222,697,500	
	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	9	603,661,300	
	Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan	1	75,000,000	
	Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah	2	270,000,000	
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksana Pembangunan Daerah	6	733,869,000	
	Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2	221,000,000	
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1	2,000,000,000	
	Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	33	5,325,470,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	1,040,470,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	90,000,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	80,000,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	51,100,000	
	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	2	189,370,000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Penelitian dan Pengembangan	17	3,874,530,000	
	Dinas Perhubungan	23	3,901,757,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15	3,102,907,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6	515,500,000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	208,350,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	75,000,000	
	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	24	1,458,295,400	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15	953,300,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	245,500,000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	49,500,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	45,000,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	164,995,400	
	Badan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Daerah	26	3,059,032,800	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	1,054,141,200	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	375,736,600	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	26,500,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	96,100,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	101,055,000	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pencegahan dan Penanganan Trafficking, KDRT, dan Korban Pelecehan Seksual	2	1,075,000,000	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1	193,000,000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	1	137,500,000	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17	2,420,469,800	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	1,920,239,800	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	450,000,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	50,230,000	
	Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu	11	1,301,950,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	1,150,150,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	85,000,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	66,800,000	
	Dinas Pemuda dan Olahraga	29	2,820,188,900	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	1,965,565,500	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6	420,550,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	160,178,400	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	64,461,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1	47,000,000	
	Program Pelayanan Manajemen Keolahragaan, Kepemudaan dan Kepramukaan	5	162,434,000	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	36	4,385,114,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16	1,093,082,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	277,612,000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	7,480,000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	25,000,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	251,000,000	
	Program Pembinaan Idiologi dan pengembangan wawasan kebangsaan	3	1,032,000,000	
	Program Penanganan Konflik	2	658,440,000	
	Program Pengendalian Stabilitas Daerah	3	583,000,000	
	Program Pendidikan Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga	4	457,500,000	
	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	32	20,588,448,700	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	20	17,046,764,900	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	794,330,000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2	1,186,825,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6	1,404,099,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	156,429,800	
	Biro Administrasi Pembangunan	17	2,225,000,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4	597,000,000	
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2	645,000,000	
	Program Koordinasi Pembangunan Ekonomi dan Kemitraan	1	147,500,000	
	Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan	9	703,500,000	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	132,000,000	
	Biro Bina Mental	6	29,098,440,000	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Keagamaan	1	8,344,440,000	
	Program Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah	1	200,000,000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan	1	130,000,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Biro	2	175,000,000	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Keagamaan	1	20,249,000,000	
	Biro Bina Sosial	5	435,000,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	215,000,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Biro	4	220,000,000	
	Biro Hukum	13	2,018,000,000	
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2	393,000,000	
	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2	143,500,000	
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	9	1,481,500,000	
	Biro Humas & Protokol	18	8,595,000,000	
		1	0	
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	4	1,959,500,000	
	Program pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah	7	2,906,800,000	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1	129,200,000	
	Distribusi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung	3	3,297,500,000	
	Program kerjasama informasi dan media massa	2	302,000,000	
	Biro Keuangan	49	9,378,473,000	
	Program Peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan Daerah	2	649,400,000	
	Program Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	9	691,530,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah	16	3,143,290,000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan	14	2,544,623,000	
	Program Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	6	2,279,130,000	
	Program Peningkatan Pengelolaan Investasi dan Penyertaan Modal serta PPK-BLUD	2	70,500,000	
	Biro Organisasi	15	3,298,000,000	
	Program Penataan Kelembagaan	4	955,000,000	
	Program Ketatalaksanaan	4	241,500,000	
	Program Pendayagunaan Kinerja Aparatur	4	270,500,000	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	3	1,831,000,000	
	Biro Otonomi Daerah	19	4,119,100,400	
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1	168,112,000	
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	6	749,000,000	
	Program pembinaan & Fasilitas pengelolaan keuangan desa	4	473,000,000	
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	3	1,050,721,400	
	Program pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah	1	305,100,000	
	Program Pengembangan Data / Informasi	4	1,373,167,000	
	Biro Perekonomian	4	692,216,000	
	Program Koordinasi Pembangunan Ekonomi dan Kemitraan	1	46,500,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Biro	3	645,716,000	
	Biro Perlengkapan dan Aset	36	33,444,500,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	386,760,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6	18,500,235,000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	872,715,000	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	26	13,684,790,000	
	Biro Tata Pemerintahan Umum	16	2,547,000,000	
	Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	1	69,000,000	
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	2	574,000,000	
	Program Penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil	3	370,000,000	
	Program Peningkatan Peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah	3	633,000,000	
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	4	526,000,000	
	Penyelesaian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	1	54,000,000	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	321,000,000	
	Biro Umum	52	67,448,700,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	18	32,969,700,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10	15,815,000,000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	515,000,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	400,000,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	325,000,000	
	Program Peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan Daerah	1	775,000,000	
	Program Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	1	740,000,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan	1	500,000,000	
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala	3	4,992,000,000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKED PERUBAHAN TH 2016	%
	daerah			
	Program pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah	13	10,109,500,000	
	Program Ketatalaksanaan	2	307,500,000	
	SEKRETARIAT DPRD	61	110,903,007,200	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	19	16,116,466,500	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12	9,482,963,800	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	1,952,250,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	2,771,899,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7	3,036,439,400	
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	14	69,624,540,000	
	Program pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah	6	7,918,448,500	
	Dinas Pendapatan Daerah	51	22,198,298,900	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	7,916,486,348	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	2,722,799,752	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	276,474,906	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	319,254,900	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	329,931,117	
	Program Peningkatan Pelayanan Pajak	6	1,194,000,000	
	Program Peningkatan Pelayanan Pendapatan Non Pajak	4	803,380,000	
	Program Peningkatan Pelayanan Teknologi Informasi Pendapatan	8	6,591,635,420	
	Program Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Pendapatan Daerah	5	632,336,457	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program Pengembangan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah	8	1,412,000,000	
	Inpektorat Provinsi	46	6,000,000,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15	996,699,600	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	288,391,170	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	0	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	392,104,100	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	62,858,500	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	22	4,197,676,330	
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur pengawasan	2	62,270,300	
	Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta	21	7,681,072,190	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	2,445,431,250	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	1,191,515,940	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	15,672,500	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	211,924,000	
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1	132,067,500	
	Program Peningkatan Pelayanan BLUD Unit Kerja Bagian Umum	1	1,300,000,000	
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	3	2,384,461,000	
	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA	25	1,911,757,616	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	709,354,116	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	89,175,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	187,880,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	96,000,000	
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kelembagaan	7	829,348,500	
	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	42	2,838,130,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15	1,710,814,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	176,000,000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2	35,000,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	51,186,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	144,380,000	
	Program Ketatalaksanaan	2	48,350,000	
	Program Kerjasama Antar Lembaga	1	30,000,000	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	5	140,000,000	
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	3	262,400,000	
	Program Peningkatan sistem Monitoring dan Evaluasi	2	240,000,000	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	43	6,976,365,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16	2,059,179,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	394,000,000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	137,500,000	
	Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS	1	177,676,600	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	150,080,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	162,000,000	
	Program Pendidikan Kedinasan	1	180,000,000	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	14	3,529,825,400	
	Peningkatan kualitas aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintah	2	186,104,000	
	Kantor Sandi Daerah	21	837,610,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	430,770,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	86,000,000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	0	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	228,970,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	22,000,000	
	Program pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah	1	69,870,000	
	Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21	1,695,100,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	954,600,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	517,000,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	72,500,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	151,000,000	
	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	18	1,251,658,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	1,017,319,500	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	171,004,500	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	63,334,000	
	Badan Pendidikan dan Latihan Daerah	49	11,035,849,500	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	17	1,682,659,930	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8	1,025,021,020	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10	7,401,902,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	114,265,550	
	Program Pendidikan Kedinasan	1	102,480,000	
	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	2	176,219,000	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	5	419,702,000	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1	10,000,000	
	Monitoring dan Pembinaan Kediklatan	1	79,000,000	
	Program Pembinaan dan Permasayarakatan Olahraga	1	24,600,000	
	Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa	22	2,168,412,100	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	1,301,158,500	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	207,666,600	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4	55,112,000	
	Program Peningkatan Layanan Pengadaan	4	322,842,500	
	Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Database dan Pelaporan Barang/Jasa	3	281,632,500	
	Badan Ketahanan Pangan Daerah	19	807,438,250	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	607,831,250	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	119,000,000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2	3,600,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	77,007,000	
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	21	1,563,690,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	1,170,190,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	100,000,000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	0	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	47,000,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	91,500,000	
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1	155,000,000	
	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	32	2,326,633,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15	1,207,140,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	630,000,000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	54,000,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	120,000,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	91,515,000	
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	1	39,637,000	
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	4	100,754,000	
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	3	83,587,000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Dinas Komunikasi dan Informatika	40	9,849,981,600	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	2,122,036,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	372,466,200	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	52,250,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	221,600,600	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	8	643,500,000	
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	1	33,159,000	
	Program kerjasama informasi dan media massa	9	3,559,807,000	
	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	4	2,319,562,800	
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga komunikasi	2	501,600,000	
	Peningkatan Kapasitas Updating Situs Resmi Mitra Praja Utama (MPU)	1	24,000,000	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	5	2,201,720,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1,627,720,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	348,000,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	226,000,000	
	Dinas Perkebunan	40	4,834,775,500	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	1,286,087,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	488,578,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	60,163,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	32,277,000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	4	1,426,688,500	
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	4	205,625,000	
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	4	881,014,000	
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	7	454,343,000	
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	24	2,215,120,075	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	18	1,726,311,830	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	125,000,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	35,000,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	328,808,245	
	Dinas Kehutanan	12	1,692,835,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	757,586,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	706,935,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	228,314,000	
	Dinas Pertambangan dan Energi	16	3,260,684,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	2,175,959,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	575,725,000	
	Program Pendidikan Masyarakat	1	150,000,000	
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	1	143,500,000	
	Peningkatan Kapasitas sistem Pelaporan dan Evaluasi	1	150,500,000	
	Pengembangan Data dan Informasi Bidang Pertambangan dan Energi	1	65,000,000	
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	21	3,125,000,000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16	2,270,000,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	155,000,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	100,000,000	
	PROGRAM EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA	1	600,000,000	
	Dinas Kelautan dan Perikanan	24	8,327,018,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	3,644,240,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	1,526,610,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	185,610,000	
	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	2	2,347,878,000	
	Program Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Monitoring Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan	2	547,340,000	
	Program Pengembangan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan	2	75,340,000	
	Dinas Perdagangan	27	1,598,750,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	972,400,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	200,500,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5	110,650,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6	233,200,000	
	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	2	82,000,000	
	Dinas Perindustrian	19	1,738,141,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	1,103,043,000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	307,945,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	154,425,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	172,728,000	
6	Mendukung stabilitas kamtibmas dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif	31	7,648,056,500	0.35%
	Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu	14	3,175,788,000	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi-	4	1,558,800,000	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	5	798,700,000	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	5	818,288,000	
	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	14	4,253,268,500	
	Program penegakan Peraturan Perundang undangan	5	498,925,000	
	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)	9	3,754,343,500	
	Biro Bina Mental	1	75,000,000	
	Program Peningkatan Apresiasi Terhadap Kesenian dan Budaya	1	75,000,000	
	Biro Perekonomian	2	144,000,000	
	Program Koordinasi Pembangunan Ekonomi dan Kemitraan	2	144,000,000	
7	Mengembangkan industri, pariwisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing koperasi & UMKM	113	23,702,291,534	1.09%
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	723,926,500	
	Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan	3	573,926,500	
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksana Pembangunan Daerah	1	150,000,000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Badan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Daerah	1	117,500,000	
	Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan	1	117,500,000	
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH	46	5,300,936,634	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	714,549,200	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	170,754,800	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	46,715,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6	267,706,000	
	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	1	128,721,634	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	10	783,707,000	
	Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM	3	740,000,000	
	Program Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM	1	25,275,000	
	Program Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM	1	2,000,000,000	
	Program peningkatan dan pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	7	423,508,000	
	Biro Bina Mental	2	475,000,000	
	Program peningkatan koordinasi sumber daya pendidikan	1	75,000,000	
	Program Peningkatan Apresiasi Terhadap Kesenian dan Budaya	1	400,000,000	
	Biro Perekonomian	7	628,000,000	
	Program Koordinasi Pembangunan Ekonomi dan Kemitraan	3	305,000,000	
	Program Pengembangan investasi untuk mendukung peningkatan ekonomi daerah	4	323,000,000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta	5	972,571,300	
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1	122,870,000	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2	558,780,800	
	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	1	165,027,000	
	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	1	125,893,500	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	1	180,000,000	
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	1	180,000,000	
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	22	10,550,000,000	
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	8	6,700,000,000	
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	3	780,000,000	
	Program Pengembangan Kemitraan	5	1,434,000,000	
	PROGRAM EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA	3	1,336,000,000	
	PROGRAM EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA DESAIN DAN IPTEK	1	300,000,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KREATIFITAS SUMBER DAYA MANUSIA	2	0	
	Dinas Kelautan dan Perikanan	7	1,397,603,400	
	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	2	1,124,200,000	
	Program pengembangan budidaya perikanan	2	0	
	Program pengembangan perikanan tangkap	2	273,403,400	
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	1	0	
	Dinas Perindustrian	18	3,356,753,700	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	193,839,700	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	33,831,000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	1	77,960,000	
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	9	2,162,788,000	
	Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	4	888,335,000	
8	Memantapkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan meningkatkan kesiagaan penanggulangan bencana	62	38,356,311,800	1.76%
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	454,884,000	
	Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan	4	454,884,000	
	Dinas Perhubungan	1	122,000,000	
	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi Serta Meteorologi dan Geofisika*	1	122,000,000	
	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	4	244,602,800	
	Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	4	244,602,800	
	Biro Perekonomian	1	57,000,000	
	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan dan Kelistrikan	1	57,000,000	
	Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17	13,135,578,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	128,400,000	
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4	2,403,300,000	
	Program Kedaruratan dan Logistik	5	1,332,000,000	
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	5	9,114,878,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	2	157,000,000	
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1	250,000,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENERAPAN & PEMB. TTG, SDA, DAN LH	1	250,000,000	
	Dinas Kehutanan	15	4,824,306,000	
	Program rehabilitasi hutan dan lahan	2	3,008,335,000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	3	414,000,000	
	Program perencanaan dan pengembangan hutan	6	903,340,460	
	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	4	498,630,540	
	Dinas Pertambangan dan Energi	17	8,928,991,000	
	Program Pendidikan Masyarakat	3	273,095,000	
	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	5	659,946,000	
	Program Peningkatan Pendapatan Daerah dari Hasil Pertambangan	2	492,000,000	
	Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Potensi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan dan Energi Alternatif	2	6,615,600,000	
	Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Mineral, Panas Bumi, dan Geologi	4	710,000,000	
	Pengembangan Data dan Informasi Bidang Pertambangan dan Energi	1	178,350,000	
	Dinas Kelautan dan Perikanan	2	10,338,950,000	
	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	2	10,338,950,000	
TOTAL		2292	2,174,643,810,808	100.00%

3.2. Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan, Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 26 urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan 8 urusan pilihan. Berikut ditampilkan tabel mengenai anggaran penetapan per urusan sebelum dan sesudah perubahan APBD tahun 2016:

Tabel III-2 Rekap Anggaran Penetapan Per Urusan Tahun 2016 Provinsi Lampung

Kode	URUSAN / BIDANG	SEBELUM		SESUDAH	
		JUMLAH USULAN	PAGU INDIKATIF	JUMLAH USULAN	PAGU INDIKATIF
00	NON URUSAN				
00 00	PROGRAM SETIAP SKPD	924	271,697,274,056	919	253,761,762,687
	Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu	11	1,555,000,000	11	1,555,000,000
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	20	2,800,000,000	20	2,800,000,000
	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA	18	1,308,000,000	18	1,308,000,000
	Inspektorat Provinsi	21	1,645,720,970	22	1,645,720,970
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	23	1,768,560,000	23	1,768,560,000
	Dinas Perdagangan	25	1,585,000,000	25	1,585,000,000
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19	13,212,313,000	19	13,212,313,000
	Dinas Pertambangan dan Energi	12	3,488,334,000	12	3,488,334,000
	Kantor Sandi Daerah	20	927,000,000	20	927,000,000
	Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta	18	4,224,927,700	16	4,224,927,700
	Dinas Perkebunan	21	2,245,000,000	21	2,245,000,000
	Dinas Kesehatan	18	20,988,437,700	18	20,988,437,700
	Badan Pendidikan dan Latihan Daerah	38	11,537,181,500	38	11,537,181,500
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	30	2,513,050,000	24	2,513,050,000
	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	18	1,325,000,000	18	1,325,000,000
	Dinas Perhubungan	23	4,527,600,000	23	4,527,600,000
	SEKRETARIAT DPRD	41	27,015,714,000	41	27,015,714,000
	Biro Umum	31	38,163,000,000	31	38,163,000,000
	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	24	2,337,700,000	24	2,337,700,000
	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	23	1,649,300,000	23	1,649,300,000
	Dinas Pengairan dan Pemukiman	28	11,139,750,000	28	11,139,750,000

Kode	URUSAN / BIDANG	SEBELUM		SESUDAH	
		JUMLAH USULAN	PAGU INDIKATIF	JUMLAH USULAN	PAGU INDIKATIF
	Dinas Kelautan dan Perikanan	17	5,790,610,000	18	5,790,610,000
	Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa	14	1,550,000,000	15	1,550,000,000
	Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	14	1,335,000,000	14	1,335,000,000
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	20	1,706,540,000	20	1,706,540,000
	Dinas Bina Marga	28	12,539,575,880	28	12,539,575,880
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	26	2,956,895,600	26	2,956,895,600
	Dinas Pendapatan Daerah	18	11,922,261,006	18	11,922,261,006
	Badan Ketahanan Pangan Daerah	19	984,950,000	19	984,950,000
	Badan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Daerah	22	2,013,655,000	22	2,013,655,000
	Dinas Kehutanan	12	1,767,485,000	12	1,767,485,000
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21	2,869,000,000	21	2,869,000,000
	Biro Perlengkapan dan Aset	10	20,611,240,000	10	20,611,240,000
	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	32	20,818,194,700	32	20,818,194,700
	Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22	1,915,000,000	22	1,915,000,000
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17	3,239,000,000	17	3,239,000,000
	Dinas Perindustrian	23	1,927,605,000	23	1,927,605,000
	RS. Jiwa DAERAH	4	2,447,604,800	4	2,447,604,800
	RSUD Dr.HABDUL MOELOEK	3	4,782,350,000	3	4,782,350,000
	Dinas Komunikasi dan Informatika	15	3,098,168,200	29	2,148,000,000
	Dinas Pemuda dan Olahraga	23	3,027,750,000	23	3,027,750,000
	Biro Bina Sosial	1	200,000,000	1	200,000,000
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	5	2,657,720,000	5	2,657,720,000
	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	29	2,148,000,000	29	2,148,000,000
	Dinas Sosial	20	1,217,080,000	20	1,217,080,000
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH	23	1,515,000,000	23	1,515,000,000
	Biro Administrasi Pembangunan	4	700,000,000	4	700,000,000
01	WAJIB				
01 01	PENDIDIKAN	88	142,761,182,000	88	106,006,177,854

Kode	URUSAN / BIDANG	SEBELUM		SESUDAH	
		JUMLAH USULAN	PAGU INDIKATIF	JUMLAH USULAN	PAGU INDIKATIF
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72	139,999,687,000	72	139,999,687,000
	Dinas Perhubungan	6	1,200,000,000	6	1,200,000,000
	Dinas Pertambangan dan Energi	4	611,495,000	4	611,495,000
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	180,000,000	1	180,000,000
	Badan Pendidikan dan Latihan Daerah	1	145,000,000	1	145,000,000
	Biro Bina Mental	4	625,000,000	4	625,000,000
01 02	KESEHATAN	45	432,203,097,500	45	440,460,121,479
	Dinas Kesehatan	25	117,821,562,300	25	117,821,562,300
	RS. Jiwa Daerah	12	16,262,925,200	8	298,118,610,000
	RSUD Dr.HABDUL MOELOEK	8	298,118,610,000	12	16,262,925,200
01 03	PEKERJAAN UMUM	144	811,345,391,020	144	789,584,739,880
	Dinas Bina Marga	109	575,709,286,620	109	575,709,286,620
	Dinas Pengairan dan Pemukiman	35	235,636,104,400	35	235,636,104,400
01 04	PERUMAHAN	23	94,048,825,600	23	92,601,831,100
	Dinas Pengairan dan Pemukiman	23	94,048,825,600	23	94,048,825,600
01 05	PENATAAN RUANG	2	875,000,000	2	834,264,000
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	875,000,000	2	875,000,000
01 06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	91	14,072,266,000	83	11,242,426,299
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	65	8,856,000,000	57	8,856,000,000
	Dinas Perdagangan	2	95,000,000	20	4,665,000,000
	Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	20	4,665,000,000	2	95,000,000
	Badan Pendidikan dan Latihan Daerah	2	183,306,000	2	183,306,000
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH	1	195,000,000	1	77,960,000
	Dinas Perindustrian	1	77,960,000	1	195,000,000
01 07	PERHUBUNGAN	27	60,897,400,000	28	58,797,993,000
	Dinas Perhubungan	27	60,897,400,000	28	60,897,400,000
01 08	LINGKUNGAN HIDUP	19	4,565,200,000	19	3,509,398,000
	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	19	4,565,200,000	19	4,565,200,000
01 09	PERTANAHAN	3	643,000,000	3	643,000,000
	Biro Tata Pemerintahan Umum	3	643,000,000	3	643,000,000
01 10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3	170,000,000	3	370,000,000

Kode	URUSAN / BIDANG	SEBELUM		SESUDAH	
		JUMLAH USULAN	PAGU INDIKATIF	JUMLAH USULAN	PAGU INDIKATIF
	Biro Tata Pemerintahan Umum	3	170,000,000	3	170,000,000
01 11	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	18	6,056,345,000	18	5,234,493,000
	Badan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Daerah	17	5,986,345,000	17	5,986,345,000
	Biro Bina Sosial	1	70,000,000	1	70,000,000
01 13	SOSIAL	19	17,927,360,000	19	17,770,074,500
	Biro Bina Sosial	4	550,000,000	4	550,000,000
	Dinas Sosial	14	9,032,920,000	14	9,032,920,000
	Biro Bina Mental	1	8,344,440,000	1	8,344,440,000
01 14	KETENAGAKERJAAN	18	3,961,000,000	22	17,888,011,100
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17	3,811,000,000	21	3,811,000,000
	Biro Bina Sosial	1	150,000,000	1	150,000,000
01 15	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	21	2,858,000,000	22	3,972,490,000
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH	21	2,858,000,000	22	2,858,000,000
01 16	PENANAMAN MODAL	14	3,645,000,000	14	3,175,788,000
	Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu	14	3,645,000,000	14	3,645,000,000
01 17	KEBUDAYAAN	18	8,461,998,800	18	6,238,940,300
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13	7,114,000,000	13	7,114,000,000
	Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta	4	1,147,998,800	4	1,147,998,800
	Biro Bina Mental	1	200,000,000	1	200,000,000
01 18	PEMUDA DAN OLAHRAGA	20	12,077,447,000	20	10,292,809,610
	Dinas Pemuda dan Olahraga	17	4,172,250,000	1	7,494,367,000
	Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta	1	7,494,367,000	17	4,172,250,000
	Biro Bina Mental	2	410,830,000	2	410,830,000
01 19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	44	21,685,823,300	44	20,078,989,300
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	12	3,431,440,000	12	3,431,440,000
	Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	13,162,578,000	14	13,162,578,000

Kode	URUSAN / BIDANG	SEBELUM		SESUDAH	
		JUMLAH USULAN	PAGU INDIKATIF	JUMLAH USULAN	PAGU INDIKATIF
	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	18	5,091,805,300	18	5,091,805,300
01 20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH	392	192,265,766,424	383	210,394,950,924
	Biro Otonomi Daerah	20	3,000,000,000	20	3,000,000,000
	Biro Hukum	13	2,250,000,000	13	2,250,000,000
	Biro Administrasi Pembangunan	13	1,950,000,000	13	1,950,000,000
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	2,100,000,000	6	4,259,663,000
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	16	4,579,409,400	16	4,579,409,400
	Badan Pendidikan dan Latihan Daerah	8	775,650,000	8	775,650,000
	Biro Humas & Protokol	16	6,250,000,000	16	6,250,000,000
	Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta	6	4,259,663,000	2	185,000,000
	Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	185,000,000	2	2,100,000,000
	Biro Keuangan	49	13,984,000,000	24	6,546,250,000
	Biro Umum	22	11,337,000,000	49	13,984,000,000
	Biro Tata Pemerintahan Umum	10	1,437,000,000	10	1,437,000,000
	Biro Perlengkapan dan Aset	26	13,933,260,000	26	13,933,260,000
	Kantor Sandi Daerah	1	73,000,000	33	12,908,238,994
	SEKRETARIAT DPRD	20	57,984,286,000	1	73,000,000
	Biro Organisasi	15	3,810,000,000	20	57,984,286,000
	Biro Perekonomian	29	2,250,000,000	15	3,810,000,000
	Inpektorat Provinsi	24	4,354,279,030	3	207,000,000
	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	3	207,000,000	21	11,337,000,000
	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA	7	1,192,000,000	21	2,250,000,000
	Biro Bina Mental	19	35,219,730,000	24	4,354,279,030
	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	24	6,546,250,000	7	1,192,000,000
	Dinas Pendapatan Daerah	33	12,908,238,994	19	35,219,730,000
	Biro Bina Sosial	7	730,000,000	7	730,000,000
	Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa	7	950,000,000	7	950,000,000

Kode	URUSAN / BIDANG	SEBELUM		SESUDAH	
		JUMLAH USULAN	PAGU INDIKATIF	JUMLAH USULAN	PAGU INDIKATIF
01 21	KETAHANAN PANGAN	31	5,515,050,000	31	4,375,466,750
	Badan Ketahanan Pangan Daerah	31	5,515,050,000	31	5,515,050,000
01 22	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	17	8,043,460,000	17	6,910,748,000
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	17	8,043,460,000	17	8,043,460,000
01 24	KEARSIPAN	17	1,022,700,000	17	923,028,000
	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	17	1,022,700,000	17	1,022,700,000
01 25	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	36	8,726,831,800	37	8,026,028,800
	Biro Humas & Protokol	1	250,000,000	25	7,831,831,800
	Dinas Komunikasi dan Informatika	25	7,831,831,800	2	250,000,000
	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	10	645,000,000	10	645,000,000
01 26	PERPUSTAKAAN	8	539,600,000	8	473,072,000
	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	8	539,600,000	8	539,600,000
02	PILIHAN				
02 01	PERTANIAN	110	27,732,980,000	94	22,579,361,825
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	44	7,106,950,000	19	4,555,000,000
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	46	15,242,280,000	46	15,242,280,000
	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	1	828,750,000	1	828,750,000
	Dinas Perkebunan	19	4,555,000,000	28	7,106,950,000
02 02	KEHUTANAN	15	8,344,335,000	15	4,824,306,000
	Dinas Kehutanan	15	8,344,335,000	15	8,344,335,000
02 03	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	19	26,000,171,000	19	24,109,971,000
	Dinas Pertambangan dan Energi	19	26,000,171,000	19	26,000,171,000
02 04	PARIWISATA	16	11,269,000,000	16	8,914,000,000
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	16	11,269,000,000	16	11,269,000,000
02 05	KELAUTAN DAN PERIKANAN	54	19,592,390,000	56	32,026,443,700
	Dinas Kelautan dan Perikanan	54	19,592,390,000	56	19,592,390,000
02 06	PERDAGANGAN	36	3,468,043,500	36	2,579,713,500

Kode	URUSAN / BIDANG	SEBELUM		SESUDAH	
		JUMLAH USULAN	PAGU INDIKATIF	JUMLAH USULAN	PAGU INDIKATIF
	Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta	1	173,043,500	1	173,043,500
	Dinas Perdagangan	35	3,295,000,000	35	3,295,000,000
02 07	INDUSTRI	13	3,191,435,000	13	3,051,123,000
	Dinas Perindustrian	13	3,191,435,000	13	3,191,435,000
02 08	KETRANSMIGRASIAN	9	1,150,000,000	9	756,287,200
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	1,150,000,000	9	1,150,000,000
02 09	EKONOMI KREATIF	7	2,631,000,000	7	2,236,000,000
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7	2,631,000,000	7	2,631,000,000
TOTAL		2321	2,229,444,373,000	2,292	2,174,643,810,808

3.3. Program dan Kegiatan Berdasarkan SKPD

Berdasarkan SKPD pengampu urusan pemerintah daerah, telah dirancang program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel III-3 Program dan Kegiatan Sebelum dan Sesudah Anggaran Perubahan Berdasarkan SKPD

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	3,292,692,000.00	12	2,991,192,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6	9,919,621,000.00	6	596,750,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	0	1	0
	WAJIB				
	PENDIDIKAN				
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4	7,237,521,300.00	4	4,830,341,300.00
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	12	15,819,573,271.00	12	7,288,520,625.00
	Program Pendidikan Menengah	14	65,082,324,650.00	14	52,050,435,650.00
	Program Pendidikan Luar Biasa	1	1,447,000,000.00	1	608,465,000.00

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3	2,300,000,000.00	3	974,402,500.00
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	9	18,459,652,650.00	9	13,638,752,650.00
	Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan	5	2,500,000,000.00	5	978,487,500.00
	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	2	3,300,000,000.00	2	1,839,253,000.00
	Program Pendidikan Tinggi	2	8,440,000,000.00	2	7,994,000,000.00
	Program Kegiatan Belajar Mengajar	1	10,723,615,129.00	1	10,723,615,129.00
	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	19	4,690,000,000.00	19	2,764,579,500.00
	KEBUDAYAAN				
	Program Pengembangan Nilai Budaya	1	204,000,000.00	1	5,795,000.00
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	4	1,810,000,000.00	4	1,229,450,000.00
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	5	2,000,000,000.00	5	1,335,800,000.00
	Pengembangan Seni Budaya Lampung	3	3,100,000,000.00	3	2,621,217,500.00
		104	160,326,000,000.00	104	112,471,057,354.00
	Dinas Kesehatan				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	4,959,447,100.00	13	3,742,947,100.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	15,666,290,600.00	4	2,226,778,100.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	362,700,000.00	1	0
	WAJIB				
	KESEHATAN				
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2	13,573,966,500.00	2	10,497,176,500.00
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	7,606,963,500.00	1	4,159,575,500.00
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1	22,743,875,800.00	1	10,896,027,100.00
	Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan	1	8,741,914,000.00	1	6,091,914,000.00
	Program Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	1	1,750,000,000.00	1	858,350,000.00

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan	2	47,431,271,200.00	2	45,357,271,200.00
	Program kebijakan dan manajemen Pembangunan Kesehatan	4	1,196,521,500.00	4	617,553,000.00
	Program Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1	2,004,000,000.00	1	894,000,000.00
	Program Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional	2	730,385,500.00	2	418,864,750.00
	Program Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	2	241,879,000.00	2	138,879,000.00
	Program Pemberantasan Penyakit	1	7,700,000,000.00	1	4,344,946,500.00
	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	2,485,410,300.00	4	1,132,749,100.00
	Program Promosi Kesehatan	2	1,365,375,000.00	2	722,246,000.00
	Program Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan	1	250,000,000.00	1	81,500,000.00
		43	138,810,000,000.00	43	92,180,777,850.00
	RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	3,671,390,000.00	2	3,773,090,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	1,110,960,000.00	1	1,110,960,000.00
	WAJIB				
	KESEHATAN				
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	4	119,226,390,000.00	4	118,685,150,625.00
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	23,192,220,000.00	2	23,107,714,375.00
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	1	155,000,000,000.00	1	196,481,201,629.00
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1	700,000,000.00	1	697,272,500.00
		11	302,900,960,000.00	11	343,855,389,129.00
	RS. JIWA DAERAH				
	NON URUSAN				

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1,698,202,800.00	1	1,723,542,800.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	461,950,000.00	1	458,950,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	104,892,000.00	1	104,742,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	182,560,000.00	1	245,556,000.00
	WAJIB				
	KESEHATAN				
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3	156,065,000.00	3	102,816,000.00
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1	36,130,000.00	1	25,400,000.00
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	3	7,030,379,200.00	3	6,555,188,650.00
	Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan	2	491,346,000.00	2	108,060,000.00
	Program kebijakan dan manajemen Pembangunan Kesehatan	1	519,805,000.00	1	467,465,050.00
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	1	8,000,000,000.00	1	8,000,000,000.00
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1	29,200,000.00	1	18,800,000.00
		16	18,710,530,000.00	16	17,810,520,500.00
	Dinas Bina Marga				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	8,212,170,500.00	14	8,140,121,900.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6	2,506,506,800.00	6	2,441,814,800.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	322,000,000.00	1	0
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	680,500,000.00	2	407,980,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	818,398,580.00	5	803,398,580.00
	WAJIB				

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	PEKERIAAN TIMTIM				

	Jembatan		340,579,898,520.00	46	339,370,927,550.00
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	40	169,014,449,100.00	40	162,502,688,870.00
	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	2	2,294,100,000.00	2	2,282,100,000.00
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	6	12,428,150,000.00	6	9,481,142,600.00
	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	2	11,615,000,000.00	2	11,296,320,460.00
	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	5	1,513,488,000.00	5	1,460,488,000.00
	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	5	2,668,200,000.00	5	2,279,200,000.00
	Pembangunan Jalan-jalan Strategis	3	29,596,001,000.00	3	29,577,001,000.00
		137	588,248,862,500.00	137	570,043,183,760.00
	Dinas Pengairan dan Pemukiman				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	7,438,500,000.00	14	7,238,500,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	3,133,000,000.00	5	3,133,000,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	251,250,000.00	1	251,250,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	125,000,000.00	1	75,000,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7	192,000,000.00	7	192,000,000.00
	WAJIB				
	PEKERJAAN UMUM				
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	11	180,230,207,200.00	11	179,158,707,200.00
	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	9	29,705,897,200.00	9	27,827,672,200.00
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3	2,450,000,000.00	3	1,857,000,000.00

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Program pengendalian banjir	5	8,900,000,000.00	5	8,763,992,000.00
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	3	8,500,000,000.00	3	7,989,000,000.00
	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	4	5,850,000,000.00	4	5,738,500,000.00
	PERUMAHAN				
	Program Pengembangan Perumahan	4	1,475,000,000.00	4	1,231,506,000.00
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	9	25,879,000,000.00	9	25,509,978,300.00
	Program Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung dan Lingkungan	5	63,464,000,000.00	5	63,232,501,200.00
	Program Perencanaan Tata Ruang	4	2,250,000,000.00	4	1,647,020,000.00
	Program Pengembangan Data/Informasi	1	980,825,600.00	1	980,825,600.00
		86	340,824,680,000.00	86	334,826,452,500.00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	1,902,000,000.00	14	1,840,300,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	770,000,000.00	4	1,055,600,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	52,000,000.00	1	52,000,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	145,000,000.00	2	142,394,000.00
	WAJIB				
	PENATAAN RUANG				
	Program Perencanaan Tata Ruang	2	875,000,000.00	2	834,264,000.00
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
	Program Pengembangan data/informasi	10	1,454,000,000.00	10	1,216,847,500.00
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1	140,000,000.00	1	99,143,000.00
	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	12	2,326,000,000.00	12	714,661,300.00
	Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan	14	1,910,000,000.00	13	1,992,801,500.00
	Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah	8	1,133,000,000.00	7	1,014,000,000.00
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksana Pembangunan Daerah	12	1,043,000,000.00	8	968,869,000.00

No.	SKPD / Urusan / Bidang / Program	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
	Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	8	850,000,000.00	6	632,773,365.00
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH				
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1	2,000,000,000.00	1	2,000,000,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	1	100,000,000.00	1	98,200,000.00
		90	14,700,000,000.00	82	12,661,853,665.00
	Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	1,085,000,000.00	11	1,040,470,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	90,000,000.00	1	90,000,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	100,000,000.00	1	80,000,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	60,000,000.00	1	51,100,000.00
	WAJIB				
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	2	240,000,000.00	2	189,370,000.00
	Penelitian dan Pengembangan	18	4,425,000,000.00	18	3,949,060,000.00
		34	6,000,000,000.00	34	5,400,000,000.00
	Dinas Perhubungan				
	NON URUSAN				
	PROGRAM SETIAP SKPD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15	3,166,750,000.00	15	3,102,907,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6	1,077,500,000.00	6	515,500,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	208,350,000.00	1	208,350,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	75,000,000.00	1	75,000,000.00
	WAJIB				

Bila ditinjau sumber pertumbuhannya, meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung pada triwulan I 2016 didorong oleh kinerja sektor Konstruksi (1,44%); sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (0,62%); serta sektor Industri Pengolahan (0,61%).

Tabel I-3 Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (persen)

Komponen		Pertumbuhan		Sumber Pertumbuhan
		Triwulan I-2016 terhadap Tw IV-2015	Triwulan I-2016 terhadap Tw I-2015	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38.11	1.11	0.39
B	Pertambangan dan Penalihan	-1.3	2.49	0.15
C	Industri Pengolahan	-7.89	3.58	0.61
D	Pengadaan Listrik, Gas	6.49	25.56	0.02
E	Pengadaan Air	-2.21	5.77	0.01
F	Konstruksi	-13.46	19.07	1.44
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0.54	5.4	0.62
H	Transportasi dan Pergudangan	-2.05	9.2	0.43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.05	7.18	0.09
J	Informasi dan Komunikasi	7.57	11.28	0.48
K	Jasa Keuangan	0.03	5.29	0.11
L	Real Estate	1.85	6.2	0.19
M, N	Jasa Perusahaan	1.3	4.47	0.01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan jaminan Sosial Wajib	-11.77	7.14	0.21
P	Jasa Pendidikan	-3.98	8.1	0.22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.73	5.71	0.05
R, S, T, U	Jasa lainnya	0.1	2.97	0.03
PDRB		6.51	5.05	5.05

Dari sisi Pengeluaran (Tabel 1.4), Konsumsi Rumah Tangga menjadi penyumbang terbesar sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dengan andil sebesar 3,16%, kemudian diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto 1,65%. Sementara itu, sumber pertumbuhan yang berasal dari aktifitas ekspor dan impor masih tercatat negatif.

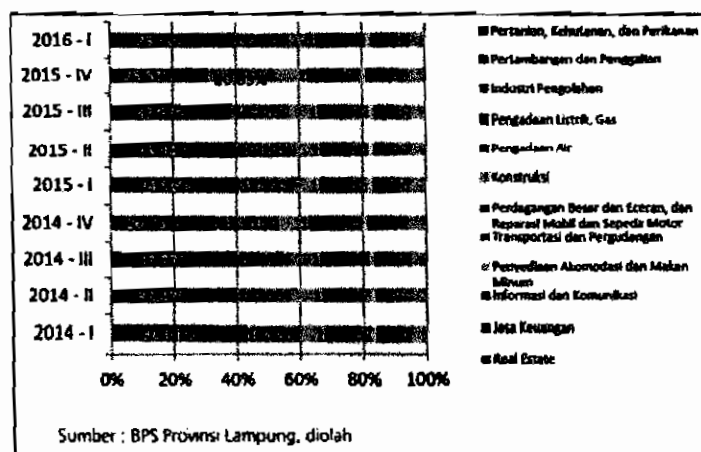
Tabel I-4 Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010 (persen)

Komponen	Tw I	Tw IV	Tw I	Tw I	Tw IV	Tw I	Andil
----------	------	-------	------	------	-------	------	-------

	2015 (qtq)	2015 (qtq)	2016 (qtq)	2015 (yoy)	2015 (yoy)	2016 (yoy)	Tw I 2016
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	0,03	-0,40	0,36	5,75	4,98	5,33	3,16
2. Pengeluaran konsumsi LNPRT	-1,77	11,45	-17,13	-4,35	22,73	3,54	0,04
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	-43,29	30,97	-44,63	10,84	11,64	8,99	0,54
4. Pembentukan modal tetap bruto	-5,47	6,31	-7,01	2,41	7,36	5,61	1,65
5. Perubahan inventori	1172,03	-74,95	1100,28	7,52	-16,88	-21,56	-0,03
6. Ekspor barang dan jasa	-0,53	-7,74	-1,44	13,15	-12,13	-12,95	-6,29
7. Dikurangi impor barang dan jasa	-22,11	23,20	-27,24	13,76	-7,19	-13,31	-5,98
PDRB	6,79	-8,38	6,51	4,91	5,33	5,05	5,05

Merujuk pada Grafik I-2, kontribusi bagi struktur perekonomian Provinsi Lampung menurut lapangan usaha pada Triwulan I-2016 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (33,90 persen); Industri Pengolahan (17,81 persen); dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (10,72 persen). Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, hanya pangsa sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami peningkatan. Sedangkan pangsa sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Besar-Eceran, dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor mengalami penurunan pangsa terhadap total perekonomian di Provinsi Lampung.

Grafik I-2 Kontribusi PDRB Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha



Dari sisi pengeluaran (Tabel I-5), kontribusi bagi struktur ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I 2016 masih tetap didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan pangsa sebesar 59,73% terhadap total pengeluaran ekonomi Provinsi Lampung. Selanjutnya, peranan Ekspor barang dan jasa (41,34%), Impor barang jasa (38,74%), PMTB/investasi (29,29%) serta Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (7,11%) dari total pengeluaran ekonomi Provinsi Lampung.

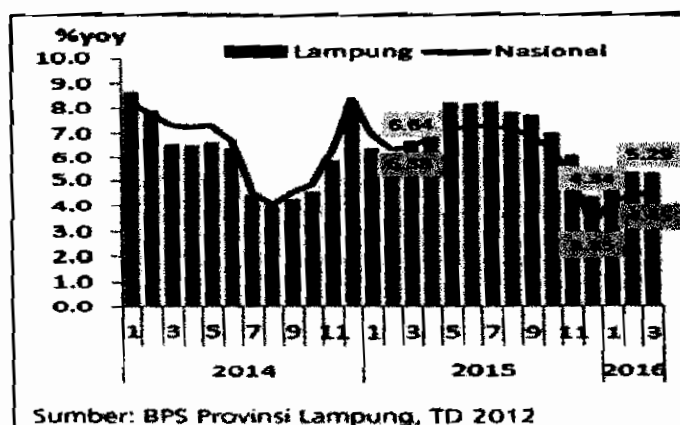
Tabel I-5 PDRB menurut Pengeluaran ADHB (triliun rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			
	Triw I-2015	Triw IV-2015	Triw I-2016	TW I-2016(%)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	38.865,74	39.025,45	39.812,18	59,73
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	758,95	990,94	848,80	1,27
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.058,78	8.502,21	4.737,29	7,10
4. PMTB & Perubahan Inventori	17.911,13	20.832,74	19.525,90	29,29
5. Ekspor Barang dan Jasa	30.768,47	26.426,11	27.557,48	41,34
6. Impor Barang dan Jasa	29.557,19	33.995,70	25.825,44	38,74
PDRB	60.785,88	61.783,75	66.656,20	

Inflasi Daerah

Secara tahunan (Grafik 1.3), laju inflasi gabungan di Provinsi Lampung pada triwulan I 2016 (Maret 2016) tercatat sebesar 5,29% (yoy), lebih tinggi dibanding dengan triwulan sebelumnya (Desember 2015) yang sebesar 4,34% (yoy). Inflasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 4,45% (yoy). Kondisi tersebut masih jauh dari target yang telah diasumsikan sebelumnya, yaitu sebesar 4 ± 1 %.

Grafik I-3 Inflasi Tahunan Lampung dan Indonesia



Peningkatan inflasi tersebut terjadi secara merata pada dua lokasi basis penghitungan. Inflasi di Kota Bandar Lampung tercatat sebesar 5,37% (yoy), di Kota Metro mengalami inflasi sebesar 4,83% (yoy).

Penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok *volatile food* yang didorong oleh kenaikan harga bahan pangan strategis seperti bawang merah dan cabai merah seiring dengan bergesernya musim panen dan curah hujan yang tinggi. Kelompok *administered price* juga tercatat mengalami peningkatan harga meskipun terdapat kebijakan penurunan harga BBM pada awal Januari 2016. Sementara, pada kelompok *core* (inti) tercatat mengalami penurunan.

Mengamati data pada Tabel 1.5, peningkatan inflasi pada Triwulan I 2016 secara tahunan lebih didorong oleh meningkatnya harga pada kelompok Transpor dan Komunikasi dari -4,2% (yoy) menjadi 1,96% (yoy) dan meningkatnya harga pada kelompok bahan makanan dari 8,33% (yoy) menjadi 10,44% (yoy). Sementara lima kelompok lainnya mengalami penurunan inflasi.

Tabel I-6 Inflasi Tahunan menurut Kelompok Barang dan Jasa (persen yoy)

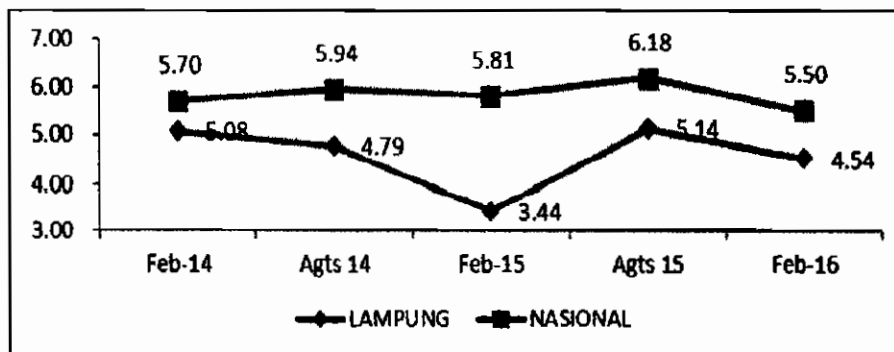
No.	Komponen	2014				2015				2016
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I
1	Bahan makanan	6.33	8.11	5.84	9.94	8.55	12.03	11.86	8.33	10.44
2	Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau	3.74	4.92	4.04	6.78	8.08	9.38	8.76	6.69	6.18
3	Perumahan	5.48	4.78	4.39	7.14	7.44	7.14	6.28	3.48	2.04
4	Sandang	1.95	2.65	0.97	0.37	2.05	3.16	4.01	4.47	2.66
5	Jasa kesehatan	7.42	6.90	6.32	7.49	6.40	11.12	10.39	10.30	9.54
6	Pendidikan, rekreasi, dan olahraga	3.65	3.41	6.07	9.03	9.02	8.78	4.28	5.00	4.96
7	Transpor dan komunikasi	13.98	10.33	1.29	10.59	1.97	3.78	4.97	-4.22	1.96
Umum		6.55	6.39	4.22	8.06	6.64	8.17	7.70	4.34	5.29

1.3.7. Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi Daerah

Pengangguran Terbuka

Secara relatif angka pengangguran terbuka Provinsi Lampung menunjukkan penurunan dari 5,14 persen pada Agustus 2015 menjadi 4,54 persen pada bulan Februari 2016. Angka pengangguran terbuka Provinsi Lampung tersebut masih di bawah angka nasional yang sebesar 5,5 persen. Bila dibandingkan dengan keadaan pada Februari 2015 (3,44 persen), angka pengangguran naik 1,1 persen.

Grafik I-4 Tingkat Pengangguran Provinsi Lampung dan Nasional



Berdasarkan lokasinya (Tabel 1.7), perkotaan masih menjadi kantong pengangguran ditunjukkan dengan tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 7,17 persen setara dengan 81,8 ribu orang. Sementara, pengangguran di perdesaan tercatat 3,51 persen setara dengan 101,7 ribu orang. Dibandingkan setahun yang lalu, jumlah pengangguran di perkotaan bertambah sebanyak 11,8 ribu orang. Sejalan dengan itu, jumlah pengangguran di perdesaan naik 32,2 ribu orang. Fenomena ini diduga berkaitan dengan menurunnya aktivitas sektor pertanian yang mendominasi kegiatan ekonomi di desa.

Tabel I-7 Pengangguran Terbuka menurut Kota-Desa Provinsi Lampung, Februari 2015 – Februari 2016

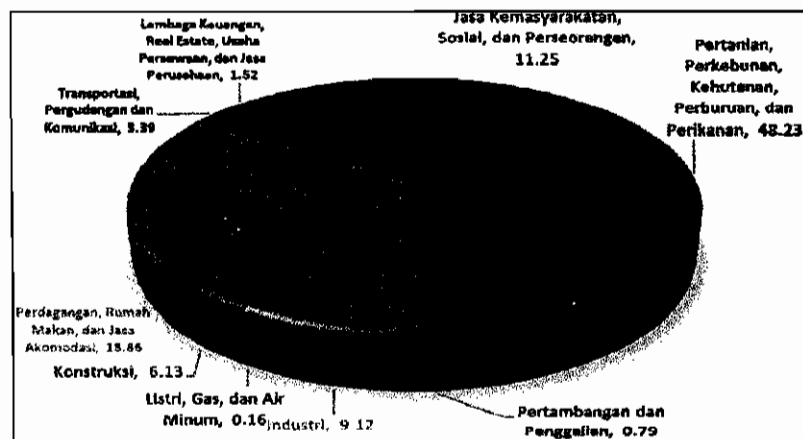
Daerah tempat tinggal	Februari 2015		Agustus 2015		Februari 2016	
	Absolut (000)	TPT (%)	Absolut (000)	TPT (%)	Absolut (000)	TPT (%)
Perkotaan	70,0	5,70	82,1	7,82	81,8	7,17
Perdesaan	69,5	2,45	114,8	4,12	101,7	3,51
Total	139,5	3,44	196,9	5,14	183,5	4,54

Menurut sektor lapangan pekerjaan utama, sektor pertanian (pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan) masih merupakan lapangan pekerjaan utama sebagian besar penduduk yang bekerja yaitu 48,23 persen. Disusul dua lapangan pekerjaan lain yakni berturut-turut perdagangan/rumah makan dan jasa akomodasi (19,47 persen) serta jasa kemasyarakatan/sosial dan perorangan (11,72 persen). Ketiga lapangan usaha utama tersebut menyerap lebih dari 75 persen tenaga kerja di Lampung. Lapangan usaha lain memiliki kontribusi penyerapan tenaga kerja kurang dari 10 persen.

Tabel I-8 Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung, Februari 2014 – 2016 (ribu)

Lapangan pekerjaan	2014		2015		2016
	Febuari	Agustus	Febuari	Agustus	Febuari
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	1885,3	1795,2	1847,9	1773,1	1859,3
Pertambangan dan Penggalian	42,7	15,2	36,4	28,9	20,8
Industri	313,8	292,2	372,6	331,4	375,4
Ilstrik, Gas dan Air Minum	3,2	4,5	4,3	5,8	9,7
Konstruksi	136,6	182,9	206,6	222,9	181,2
Perdagangan, Rumah Makan & Jasa Akomodasi	756,1	662,8	724,3	685,6	750,6
Transportasi, Pergudangan & Komunikasi	134,4	142,6	148,0	123,4	138,9
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa perusahaan	63,5	52,8	59,3	55,1	67,3
Jasa Kemasyarakatan, Sosial & Perorangan	518,5	525,0	521,7	409,0	451,6
Total	3824,2	3673,2	3921,2	3635,3	3854,8

Grafik I-5 Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Kerja Utama



Selama setahun terakhir terlihat ada pergeseran komposisi angkatan kerja menurut latar belakang pendidikan. Persentase pencari kerja yang berpendidikan tinggi (diploma/sarjana) turun dari 15,61 persen menjadi 13,38 persen. Sebaliknya, pengangguran yang mengenyam pendidikan rendah (SMP ke bawah) naik turun dari 41,26

persen menjadi 13,38 persen. Sementara pada penduduk yang bekerja terlihat adanya sedikit penurunan pada pekerja yang berpendidikan rendah. Kondisi yang sama dialami oleh pekerja yang berpendidikan tinggi. Sementara pekerja yang berpendidikan SMA (umum/kejuruan) mengalami peningkatan yakni dari 23,73 persen naik menjadi 24,76 persen.

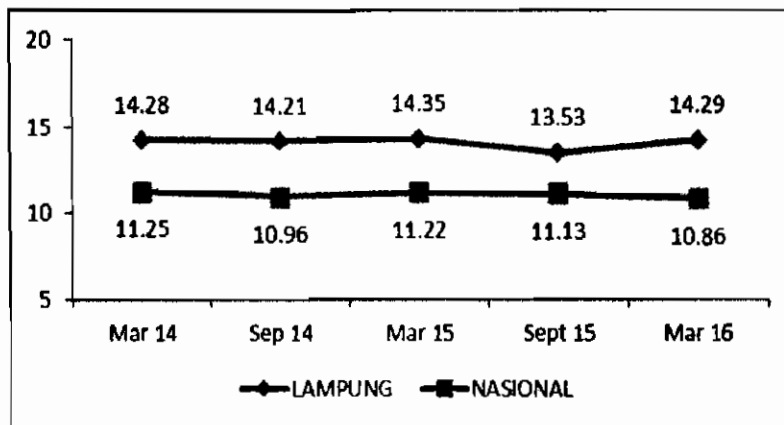
Tabel I-9 Komposisi Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Lampung, Februari 2015 – Februari 2016

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja			Pengangguran		
	Feb 2015	Agt 2015	Feb 2016	Feb 2015	Agt 2015	Feb 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<= SD	46,07	46,37	44,77	23,26	16,30	29,70
SMP	22,29	23,42	22,84	18,00	19,80	18,88
SMA Umum	14,29	16,61	15,94	25,67	39,49	24,41
SMA Kejuruan	9,44	7,14	8,82	17,46	15,57	13,63
Diploma I/II/III	2,34	1,89	2,00	3,86	2,28	1,35
Universitas	5,57	4,57	5,62	11,74	6,56	12,02
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kemiskinan

Data statistik pada Maret 2016 menunjukkan bahwa angka kemiskinan Provinsi Lampung sebesar 14,29 persen, meningkat 0,71 persen dibanding September 2015 sebesar 13,53 persen. Angka kemiskinan Lampung pada Maret 2016 tercatat masih lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia yang tercatat 10,86 persen (Grafik 1.4). Tren penurunan angka kemiskinan yang terjadi pada September 2015 kembali terkoreksi pada Maret 2016. Angka kemiskinan kembali naik, meskipun jika dibandingkan kondisi Maret 2015 masih lebih rendah. Sebaliknya pada tingkat nasional angka kemiskinan mengalami penurunan menjadikan gap antara angka kemiskinan nasional dengan Lampung kembali melebar.

Grafik 1-6 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Nasional



Perdesaan menjadi konsentrasi kemiskinan di mana 15,69 persen penduduknya berkategori miskin, sedangkan di perkotaan penduduk miskinnya 10,53 persen (Tabel 1.8). Selama periode September 2015 - Maret 2016, baik perkotaan maupun perdesaan mengalami kenaikan persentase dan jumlah penduduk miskin.

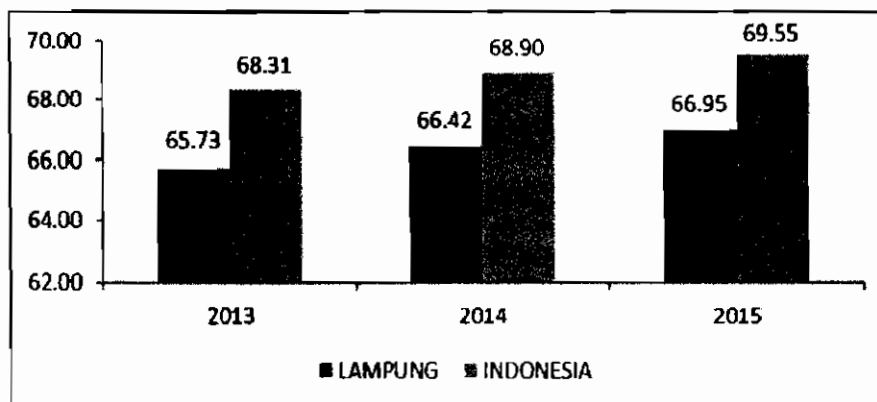
Tabel 1-10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung menurut Daerah

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2014 (Maret)	230,63	912,28	1.142,92	11,08	15,41	14,28
2014 (Sept)	224,21	919,73	1.143,93	10,68	15,46	14,21
2015 (Maret)	233,27	930,22	1.163,49	10,94	15,56	14,35
2015 (Sept)	197,94	902,74	1.100,68	9,25	15,05	13,53
2016 (Maret)	233,39	936,21	1.169,60	10,53	15,69	14,29

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Selama periode tiga tahun terakhir, IPM Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari 65,73 di tahun 2013 menjadi 66,95 di tahun 2015 (Grafik 1.5). Namun, IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM nasional. Oleh karenanya, untuk memacu ketertinggalan tersebut Provinsi Lampung perlu melanjutkan program dan kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi penduduk sebagai prioritas pembangunan secara konsisten.

Grafik I-7 IPM Provinsi Lampung dan Indonesia



Peningkatan IPM di tingkat Provinsi juga tercermin pada level kabupaten/kota (Tabel 1.9). Selama periode 2014 hingga 2015, seluruh kabupaten/ kota mengalami peningkatan IPM. Pada periode ini tercatat tiga kabupaten dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Lampung Selatan (2,31%). Kabupaten Mesuji (1,83%), dan Kabupaten Pesawaran (1,62%). Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pesawaran didorong oleh dimensi pendidikan, sementara di Kabupaten Lampung Selatan lebih dikarenakan perbaikan standar hidup layak.

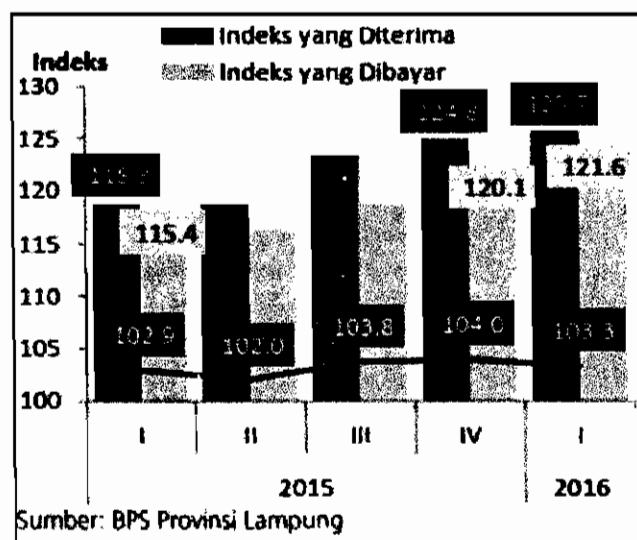
Tabel I-11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2014	2015	Perubahan (%)
Lampung Barat	63,54	64,54	1,57
Tanggamus	62,67	63,54	1,58
Lampung Selatan	63,74	65,22	2,31
Lampung Timur	66,42	67,10	1,02
Lampung Tengah	67,07	67,61	0,81
Lampung Utara	64,89	65,20	0,49
Way Kanan	64,32	65,18	1,34
Tulang Bawang	65,83	66,08	0,38
Pesawaran	61,70	62,70	1,62
Pringsewu	66,56	67,55	1,45
Mesuji	58,71	59,79	1,83
Tulang Bawang Barat	62,48	63,01	0,89
Pesisir Barat	59,76	60,55	1,32
Kota Bandar Lampung	74,34	74,81	0,64
Kota Metro	74,98	75,10	0,16

Nilai Tukar Petani

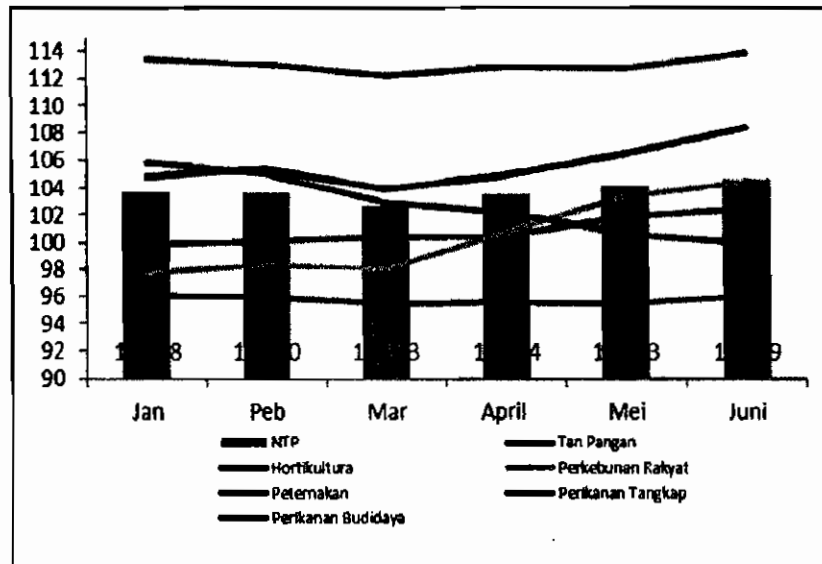
Tingkat daya beli petani di perdesaan terindikasi mengalami penurunan pada triwulan I 2016. Penurunan daya beli terindikasi pada penurunan Nilai Tukar Petani NTP pada periode laporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. NTP pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 103,3, menurun dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 104,0. Hal ini didorong oleh indeks yang diterima petani (It) tercatat tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan indeks yang dibayar petani (Ib).

Grafik I-8 Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung



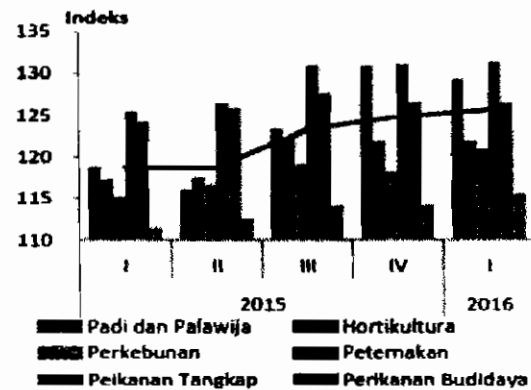
Penurunan NTP utamanya disebabkan oleh penurunan subsektor padi dan palawija dan NTP subsektor hortikultura yang masing-masing mengalami kontraksi -2,04 persen (qtq) dan -1,30 persen (qtq). Penurunan NTP subsektor padi dan palawija tersebut sejalan dengan penurunan harga Gabah Kering Panen (GKP) di Lampung hanya Rp 3.500/kg dan harga Gabah Kering Giling (GKG) diharga Rp 4.000/kg harga tersebut tercatat lebih rendah dari Harga Pembelian Pemerintah yang menetapkan GKP sebesar Rp 3.700/kg dan GKG sebesar Rp 4.600/kg. Hal ini dikarekan adanya kelebihan pasokan beras saat panen raya dan tata niaga perdagangan beras yang masih bersifat oligopoli. Sementara itu, subsektor perkebunan dan subsektor perikanan tangkap masih mengalami peningkatan NTP. Peningkatan terbesar dialami oleh sektor perkebunan yaitu 1,03 persen (qtq) dari 97,04 pada triwulan I 2015 menjadi 98,05 pada triwulan pengamatan.

Grafik I-9 Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung dan Penyusunnya



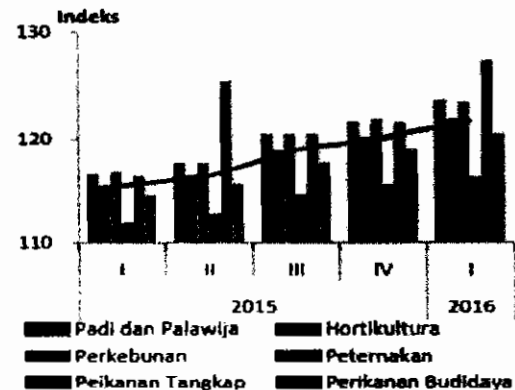
Indeks yang diterima petani meningkat di semua subsektor, kecuali subsektor padi dan palawija dan perikanan tangkap. Panen raya padi yang masih berlangsung hingga Mei 2016 yang menyebabkan pasokan melimpah penurunan harga, ditengarai akan menekan indeks yang diterima petani di subsektor padi dan palawija. Selanjutnya, peningkatan terbesar indeks yang diterima petani berasal dari subsektor perkebunan serta subsektor perikanan budidaya. Peningkatan indeks yang diterima petani di subsektor perkebunan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan indeks yang dibayar sehingga subsektor tersebut ini, NTP nya tercatat naik. Indeks yang dibayar petani di semua subsektor mengalami peningkatan. Kenaikan terbesar pada triwulan I 2016 berasal dari subsektor perikanan tangkap dan subsektor padi dan palawija.

Grafik I-10 Indeks yang Diterima Subsektor di Provinsi Lampung



Sumber: BPS Provinsi Lampung

Grafik I-11 Indeks yang Dibayarkan Subsektor di Provinsi Lampung



Sumber: BPS Provinsi Lampung

1.3.8. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tantangan Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 5,05% (yoy), lebih rendah jika dibanding dengan triwulan IV 2015 yang sebesar 5,33%. Meskipun melambat, pertumbuhan ekonomi Lampung lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 4,92% (yoy) pada periode pengamatan yang sama. Hingga Juni 2016, inflasi gabungan Provinsi Lampung tercatat 3,15% (sumber: publikasi BI) merupakan kondisi yang cukup mendukung stabilitas ekonomi Lampung di tahun 2016. Namun, perekonomian daerah masih menghadapi tantangan yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal.

Di sisi eksternal, pada tataran global terdapat risiko ketidakpastian ekonomi dan lambannya perbaikan harga komoditas pada pasar internasional akan berdampak pada aktivitas ekspor dari komoditas dan produk daerah. Lebih lanjut, Lampung sebagai bagian dari aktivitas perekonomian nasional juga memiliki sejumlah keterbatasan dalam hal pengendalian kebijakan fiskal dan moneter yang notabene dapat berdampak terhadap kondisi perekonomian daerah secara umum. Selain faktor-faktor ekonomi global dan nasional, masih terdapat eksternalitas yang berasal dari faktor-faktor nonekonomi yang dapat mempengaruhi perekonomian daerah, misal: stabilitas keamanan internasional,

faktor cuaca dan iklim, risiko bencana asap regional (kebakaran hutan dan lahan), sinkronisasi regulasi pusat dan daerah; secara langsung atau tak langsung akan berdampak terhadap kinerja ekonomi daerah.

Di sisi internal, tantangan terhadap permasalahan ekonomi daerah yang masih terus mengemuka setiap tahun, diantaranya: peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan laju inflasi yang terkendali, peningkatan kualitas infrastruktur daerah, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, meningkatkan investasi dan ekspor, pengembangan potensi ekonomi daerah yang belum optimal, memperkuat kemandirian fiskal, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Prospek Perekonomian Daerah

Sepanjang 2016, kondisi perekonomian Lampung diprediksi dapat tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai bagian dari sistem perekonomian yang terbuka, prospek perekonomian Provinsi Lampung di tahun 2016 tidak akan terlepas dari kinerja perekonomian yang terjadi pada tataran ekonomi nasional maupun global. Beberapa faktor yang dapat mendorong pertumbuhan, antara lain:

Di sisi permintaan, perekonomian Lampung diperkirakan masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Untuk mendukung konsumsi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung bersama *stake holder* terkait terus berupaya untuk mempertahankan aspek daya beli masyarakat melalui serangkaian koordinasi dan aksi menjaga stabilitas tingkat harga barang pokok sekaligus implementasi program/kegiatan pembangunan dalam rangka mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat secara umum.

Sama halnya dengan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah diharapkan dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi daerah. Ditengah lambannya pertumbuhan ekonomi, realisasi belanja pemerintah yang mencakup belanja barang/jasa dan belanja modal dalam rangka membiayai program-/kegiatan akan menjadi faktor pendorong yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Adanya percepatan proyek besar Pemerintah maupun swasta dalam bidang infrastruktur baik jalan tol Trans Sumatera, pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah,

pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan pembangkit listrik, pembangunan dan perluasan dermaga di pelabuhan Bakauheni, perluasan Bandara Radin Intan II serta pembangunan kawasan pariwisata diperkirakan mampu meningkatkan iklim investasi baik investasi asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN) di Provinsi Lampung.

Meskipun terbatas, mulai membaiknya harga komoditas dipasar internasional diharapkan dapat mendukung kegairahan kegiatan ekspor di daerah. Sementara, berjalannya kegiatan impor diharapkan tetap memberi dukungan terhadap realisasi kegiatan pada sektor industri dan konstruksi, sehingga berdampak positif terhadap perekonomian daerah.

Di sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung diperkirakan masih didorong oleh kinerja 3 (tiga) sektor utama, yaitu: sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan; sektor industri pengolahan; dan sektor perdagangan besar/eceran - reparasi mobil/ sepeda motor.

Berlangsungnya periode panen raya padi pada triwulan II 2016 diperkirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan di sektor pertanian. Selanjutnya, adanya UPSUS (upaya khusus) untuk mencapai target penambahan produksi 350.000 GKG pada tahun 2016 melalui pengembangan jaringan irigasi pertanian di lahan sawah (JIDES, JITUT): pembuatan embung dan cek dam guna meningkatkan IP lahan kering di pertanaman palawija/sayuran; gerakan pengembangan pengelolaan tanaman terpadu (GPPTT) berbasis padi hibrida dan aplikasi transplanter serta optimasi pemanfaatan sumber air permukaan (pompanisasi) turut mendorong peningkatan kinerja di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Selain itu, sebagai upaya untuk meningkatkan produksi gabah, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura juga berencana untuk melakukan cetak sawah baru seluas 15.260 ha dengan pencetakan sawah baru, Pemerintah Pusat juga berkontribusi dalam rangka meningkatkan produksi gabah dengan memberikan alokasi pupuk bersubsidi yang mengalami peningkatan sebesar 9,49% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, meningkatnya NTP di sektor perikanan memberi peluang dan daya tarik guna pengembangan usaha perikanan masyarakat nelayan maupun budidaya perikanan. Dengan adanya serangkain upaya

tersebut diperkirakan bahwa kinerja sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan akan mengalami peningkatan pada tahun 2016.

Sektor industri pengolahan juga diperkirakan akan tumbuh meningkat. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh hasil SKDU (Survei Kegiatan Dunia Usaha) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dimana perkiraan kegiatan usaha di sektor industri pengolahan mengalami peningkatan yaitu dari 0,47% pada triwulan I 2016 menjadi 3,68% pada triwulan II 2016. Meningkatnya kinerja di sektor industri pengolahan diperkirakan sejalan dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga. Selain itu, masih adanya peluang dan permintaan dari negara mitra dagang internasional yang diperkirakan turut mendorong peningkatan kinerja di sektor industri pengolahan pada tahun 2016.

Kinerja sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor diperkirakan terus membaik pada 2016. Membaiknya perekonomian global meskipun masih terbatas serta masih adanya permintaan mitra dagang dunia diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja di sektor perdagangan. Selanjutnya wq adaya beberapa kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan rencana penurunan TDL, harga BBM yang cenderung stabil, serta penurunan tarif penyeberangan Pelabuhan Merak-Bakauheni rata-rata sebesar 3% juga diperkirakan dapat mendorong kinerja disektor perdagangan. Selain itu, peningkatan kinerja di sektor perdagangan juga diperkirakan didorong oleh adanya perbaikan didorong oleh adanya perbaikan infrastruktur berupa perbaikan jalan serta pembangunan dan optimalisasi dermaga di pelabuhan.

1.3.9. Perubahan Asumsi Makro dalam Rancangan Perubahan RKPD 2016

Meninjau perkembangan terkini dari perekonomian nasional dan daerah yang telah diuraikan sebelumnya, serta dengan memperhatikan tantangan dan prospek serta berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap beberapa asumsi dasar makro ekonomi daerah tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mengajukan rancangan perubahan atas asumsi dasar makro ekonomi tahun 2016, sebagai berikut:

Meskipun tidak sekuat perkiraan awal, ekonomi Lampung tahun 2016 diperkirakan akan membaik dibanding tahun sebelumnya dan tumbuh sekitar 5,2-5,5 persen. Asumsi

tersebut lebih rendah dari asumsi APBD tahun 2016 yang telah ditetapkan sebelumnya yang sebesar 5,3 – 5,6 persen.

Laju inflasi berada pada kisaran $4,0 \pm 1,0$ persen. Besaran tersebut tentunya akan terpengaruh oleh perkembangan situasi ekonomi global dan nasional. Melalui sinergi serta koordinasi antara Pemerintah Daerah bersama lembaga/instansi dan stake holder terkait, diharapkan dapat mengawal stabilitas target inflasi tersebut sepanjang tahun 2016.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil evaluasi dan proyeksi yang telah dilakukan antara Pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan pemangku kepentingan terkait, asumsi-asumsi makro ekonomi tahun 2016 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel I-12 Perubahan Asumsi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2016

INDIKATOR MAKRO		Proyeksi APBD 2016	Proyeksi Perubahan APBD 2016
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,6	5,2 – 5,5
2	Tingkat Inflasi (%)	4 ± 1	4 ± 1
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	14,0	13,2
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0 – 4,5	4,0 – 4,5
5	Indeks Pembangunan Manusia /IPM	67 – 68	67 – 68
6	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	4 – 5	5 – 6
7	Pertumbuhan Ekspor (%)	6	$\geq 2,5$
8	Pertumbuhan Sektor Pertanian (%)	≥ 5	3,5 – 4,5
9	Pertumbuhan Sektor Industri (%)	≥ 6	≥ 6
10	Nilai Tukar Petani / NTP	104	104
11	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%)	70	70
12	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah/ PAD (%)	2,4 – 5,0	4 – 7

1.3.10. Kerangka Pokok Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan memperhatikan perkembangan indikator ekonomi makro global dan nasional, kerangka kebijakan keuangan negara pada Perubahan APBN T.A. 2016 serta rancangan asumsi-asumsi dasar ekonomi makro Provinsi

Lampung sebagaimana telah diuraikan pada Subbab 1.3.9; Pemerintah Provinsi Lampung juga melakukan penyesuaian dalam menyusun kerangka pokok keuangan daerah yang akan disampaikan pada Perubahan APBD Provinsi Lampung T.A. 2016, sebagai berikut:

Tabel I-13 Kerangka Keuangan Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Lampung TA 2016

	URAIAN	APBD 2016	PERUBAHAN APBD 2016	TAMBAH/KURANG
	PENDAPATAN	5,350,902,785,048.00	5,795,907,142,160.61	445,004,357,112.61
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,446,043,677,948.00	2,709,699,673,188.61	263,655,995,240.61
1	Hasil Pajak Daerah	2,199,300,000,000.00	2,439,800,000,000.00	240,500,000,000.00
2	Hasil Retribusi Daerah	9,880,079,120.00	6,852,424,000.00	(3,027,655,120.00)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26,980,638,828.00	26,980,638,828.00	-
4	Lain-Lain PAD yang Sah	209,882,960,000.00	236,066,610,360.61	26,183,650,360.61
	DANA PERIMBANGAN	2,835,150,963,100.00	3,017,790,276,972.00	182,639,313,872.00
1	Dana Bagi Hasil Pajak	156,586,924,000.00	146,656,997,400.00	(9,929,926,600.00)
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	57,317,167,100.00	38,289,295,000.00	(19,027,872,100.00)
3	Dana Alokasi Umum	1,321,679,032,000.00	1,082,370,229,572.00	(239,308,802,428.00)
4	Dana Alokasi Khusus	285,202,480,000.00	354,515,475,000.00	69,312,995,000.00
5	Dana Alokasi Khusus P3k2	1,014,365,360,000.00	1,395,958,280,000.00	381,592,920,000.00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	69,708,144,000.00	68,417,192,000.00	(1,290,952,000.00)
1	Pendapatan Hibah	18,683,000,000.00	17,584,048,000.00	(1,098,952,000.00)
2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	40,863,144,000.00	40,671,144,000.00	(192,000,000.00)
3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	10,162,000,000.00	10,162,000,000.00	-

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN SEMESTER I

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 merupakan dokumen penjabaran dan implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015-2019. Oleh karenanya berdasarkan RKPD Tahun 2016, telah disusun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja daerah serta target tahunan program dan kegiatan. Dukungan program dan kegiatan tersebut dijabarkan sesuai dengan misi pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019, sebagai berikut:

- 1. Misi I: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah.** Dilaksanakan oleh 24 SKPD, dengan alokasi Anggaran Rp163.948.074.070,-, yang dilaksanakan melalui 91 program dan 651 kegiatan.
- 2. Misi II: Meningkatkan Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial.** Dilaksanakan oleh 13 SKPD, dengan alokasi Anggaran Rp1.028.455.354.900,-, yang dilaksanakan melalui 49 program dan 327 kegiatan.
- 3. Misi III: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Budaya Masyarakat dan Toleransi Kehidupan Beragama.** Dilaksanakan oleh 20 SKPD, dengan alokasi Anggaran Rp700.781.849.400,-, yang dilaksanakan melalui 91 program dan 410 kegiatan.
- 4. Misi IV: Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam dan Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan.** Dilaksanakan oleh 8 SKPD, dengan alokasi Anggaran Rp23.698.476.000,-, yang dilaksanakan melalui 30 program dan 104 kegiatan.
- 5. Misi V: Menegakkan Supremasi Hukum, Membanggunan Peradaban Demokrasi, dan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.** Dilaksanakan oleh 37 SKPD, dengan alokasi Anggaran Rp312.560.618.630,-, yang dilaksanakan melalui 86 program dan 829 kegiatan.

Sesuai hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016 yang diimplementasikan melalui APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, realisasi pelaksanaan anggaran pada masing-masing SKPD hingga bulan Juni 2016 disajikan sebagai berikut:

Tabel II-1 Realisasi Belanja Langsung sampai dengan Juni 2016

No	SKPD	Anggaran		
		Belanja Langsung	Realisasi Belanja Langsung	
		(BL)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1	Biro Tata Pemerintahan Umum	2,250,000,000.00	1,127,422,780.00	50.11%
2	Biro Otonomi Daerah	3,000,000,000.00	1,636,279,478.00	54.54%
3	Biro Hukum	2,250,000,000.00	664,152,450.00	29.52%
4	Biro Perekonomian	2,250,000,000.00	1,036,554,460.00	46.07%
5	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	2,650,000,000.00	956,696,177.00	36.10%
6	Biro Bina Sosial	1,700,000,000.00	856,393,650.00	50.38%
7	Biro Bina Mental	44,800,000,000.00	14,917,388,020.00	33.30%
8	Biro Umum	49,500,000,000.00	34,742,322,555.00	70.19%
9	Biro Humas dan Protokol	6,500,000,000.00	3,943,454,241.00	60.67%
10	Biro Keuangan	13,984,000,000.00	3,913,640,353.00	27.99%
11	Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	34,544,500,000.00	11,519,944,895.00	33.35%
12	Biro Organisasi	3,810,000,000.00	674,724,350.00	17.71%
13	Sekretariat DPRD	85,000,000,000.00	46,988,051,507.00	55.28%
14	Inspektorat Provinsi	6,000,000,000.00	2,317,755,101.00	38.63%
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14,700,000,000.00	5,131,494,383.00	34.91%

No	SKPD	Anggaran		
		Belanja Langsung	Realisasi Belanja Langsung	
		(BL)	(Rp)	(%)
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	5,200,000,000.00	1,820,803,415.00	35.02%
17	Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	6,000,000,000.00	2,015,431,444.00	33.59%
18	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	6,214,500,000.00	1,605,765,178.00	25.84%
19	Badan Ketahanan Pangan Daerah	6,500,000,000.00	2,100,208,627.00	32.31%
20	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah	5,200,000,000.00	2,982,823,490.00	57.36%
21	Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah	3,900,000,000.00	1,605,076,514.00	41.16%
22	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	9,750,000,000.00	3,470,959,692.00	35.60%
23	Badan Kepegawaian Daerah	7,716,305,000.00	2,858,969,481.00	37.05%
24	Badan Pendidikan dan Latihan Daerah	12,641,137,500.00	7,493,004,446.00	59.27%
25	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8,000,000,000.00	3,010,427,017.00	37.63%
26	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	25,910,000,000.00	10,330,588,279.00	39.87%
27	RSUD Dr. H. Abdul Moeloek	302,900,960,000.00	75,144,713,027.00	24.81%
28	Rumah Sakit Jiwa	18,710,530,000.00	7,326,606,083.00	39.16%
29	Kantor Sandi	1,000,000,000.00	343,286,195.00	34.33%
30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	160,326,000,000.00	29,384,388,154.00	18.33%
31	Dinas Pemuda dan Olah Raga	7,200,000,000.00	2,379,011,449.00	33.04%
32	Dinas Kesehatan	138,810,000,000.00	16,417,251,079.00	11.83%

No	SKPD	Anggaran		
		Belanja Langsung	Realisasi Belanja Langsung	
		(BL)	(Rp)	(%)
33	Dinas Sosial	10,250,000,000.00	3,661,600,869.00	35.72%
34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8,200,000,000.00	2,501,491,463.00	30.51%
35	Dinas Perhubungan	66,625,000,000.00	3,555,502,157.00	5.34%
36	Dinas Komunikasi dan Informatika	10,930,000,000.00	4,905,043,646.00	44.88%
37	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	16,700,000,000.00	4,765,565,100.00	28.54%
38	Dinas Bina Marga	588,248,862,500.00	104,815,342,316.00	17.82%
39	Dinas Pengairan dan Permukiman	340,824,680,000.00	79,012,545,881.00	23.18%
40	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah	4,568,000,000.00	1,882,737,595.00	41.22%
41	Dinas Perindustrian	5,197,000,000.00	2,621,125,504.00	50.44%
42	Dinas Perdagangan	4,975,000,000.00	1,951,433,841.00	39.22%
43	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	17,900,000,000.00	3,938,988,601.00	22.01%
44	Dinas Perkebunan	6,800,000,000.00	2,228,010,723.00	32.76%
45	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9,620,000,000.00	2,056,605,883.00	21.38%
46	Dinas Kelautan dan Perikanan	25,383,000,000.00	11,330,535,262.00	44.64%
47	Dinas Kehutanan	10,111,820,000.00	2,503,619,338.00	24.76%
48	Dinas Pertambangan dan Energi	30,100,000,000.00	2,662,726,159.00	8.85%
49	Dinas Pendapatan Daerah	24,830,500,000.00	9,818,025,263.00	39.54%
50	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	8,700,000,000.00	2,835,733,763.00	32.59%

No	SKPD	Anggaran		
		Belanja Langsung	Realisasi Belanja Langsung	
		(BL)	(Rp)	(%)
51	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana	15,262,578,000.00	2,906,371,068.00	19.04%
52	Sekretariat DPP Korpri	2.500.000.000	1.616.801.416	64.67%
53	Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta	17,300,000,000.00	7,897,430,332.00	45.65%
54	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	3,000,000,000.00	1,601,348,457.00	53.38%
55	Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah	2,500,000,000.00	748,856,100.00	29.95%
Jumlah Belanja Langsung		2,229,444,373,000.00	562,533,028,707.00	25.23%

Tabel II-1 menunjukkan hingga Juni 2016 realisasi anggaran belanja langsung mencapai Rp562.533.028.707 atau setara 25,23 persen dari total anggaran belanja. Serapan anggaran belanja langsung terendah ada di Dinas Perhubungan yaitu 5,34 persen, sedangkan serapan tertinggi oleh Biro Umum yang mencapai 70,19 persen.

Terdapat 11 Perangkat Daerah yang memiliki serapan di atas 50 persen yaitu Biro Tata Pemerintahan Umum, Biro Bina Sosial, Dinas Perindustrian, Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah, Biro Otonomi Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah, Badan Pendidikan dan Latihan Daerah, Biro Humas dan Protokol, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, dan Biro Umum.

Di sisi lain, dari total 55 Perangkat Daerah masih terdapat 12 Perangkat Daerah yang memiliki serapan anggaran di bawah rata-rata realisasi (25,23 persen) Belanja Langsung antara lain: Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kesehatan, Biro Organisasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pengairan dan Permukiman, Dinas Kehutanan, dan RSUD dr. H. Abdul Moeloek.

Agar pelaksanaan dalam sisa waktu dapat tercapai sesuai dengan target, maka direkomendasikan untuk dilakukan langkah-langkah, yaitu:

1. Rasionalisasi dan penataan kegiatan, sehingga alokasi anggaran yang akan dilaksanakan dapat sesuai dengan target output yang ditetapkan.
2. Penjadwalan ulang Rencana Operasional untuk menyesuaikan dengan sisa waktu pelaksanaan, hal ini agar pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahapan sisa waktu efektif.
3. Percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik dan pengadaan barang dan jasa tanpa mengurangi kualitas hasil pelaksanaan pekerjaan.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Mencermati capaian pembangunan yang diperoleh hingga pertengahan tahun 2016 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada akhir tahun 2016, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi sepanjang tahun 2016; maka perpaduan berbagai tinjauan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

3.1. Sinkronisasi Program dengan Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan target capaian pembangunan daerah yang bersinergi dengan target pembangunan nasional; arah pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung masih mengacu pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016 yang telah ditetapkan, yakni "Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas" yang ditempuh melalui 8 (delapan) jalur prioritas pembangunan, sebagai berikut: (1) Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah; (2) Revitalisasi pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional; (3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan; (4) Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; (5) Memantapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur; (6) Mendukung stabilitas kamtibmas dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif; (7) Mengembangkan industri, pariwisata dan

ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM; dan (8) Memantapkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan meningkatkan kesiagaan penanggulangan bencana.

Secara garis besar, keseluruhan prioritas pembangunan tersebut diarahkan pada pencapaian sasaran makro pembangunan sesuai dengan asumsi-asumsi dasar yang telah dirancang pada Subbab 1.3.9.

Adapun rekapitulasi program/kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel III-1 Rekap RKPD Perubahan Per Prioritas Provinsi Tahun 2016 Provinsi Lampung

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
1	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah	221	716,566,790,880	32.95%
	Dinas Bina Marga	109	558,249,868,480	
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	46	339,370,927,550	
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	40	162,502,688,870	
	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	2	2,282,100,000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	6	9,481,142,600	
	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	2	11,296,320,460	
	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	5	1,460,488,000	
	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	5	2,279,200,000	
	Pembangunan Jalan-jalan Strategis	3	29,577,001,000	
	Dinas Pengairan dan Pemukiman	37	73,040,377,400	
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	10	15,058,707,200	
	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	9	27,827,672,200	
	Program pengendalian banjir	5	8,763,992,000	
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	3	7,989,000,000	
	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	4	5,738,500,000	
	Program Pengembangan Perumahan	4	1,231,506,000	
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	2	6,431,000,000	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10	1,946,599,000	
	Program Perencanaan Tata Ruang	1	729,074,000	
	Program Pengembangan data/informasi	5	606,525,000	
	Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan	1	325,000,000	
	Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah	1	36,000,000	
	Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2	250,000,000	
	Dinas Perhubungan	23	55,500,993,000	
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	9	2,662,550,000	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	2	96,000,000	
	Program peningkatan pelayanan angkutan	10	2,671,443,000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1	50,000,000,000	
	Program Antisipasi dan Pengendalian Keadaan Rescue*	1	71,000,000	
	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	19	3,509,398,000	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1	105,000,000	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	10	2,312,398,000	
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1	173,000,000	
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	2	492,000,000	
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	4	384,000,000	
	Pengembangan Sumber-sumber Alternatif Pendanaan Lingkungan	1	43,000,000	
	Dinas Pemuda dan Olahraga	1	64,000,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1	64,000,000	
	Biro Bina Mental	4	620,830,000	
	Program peningkatan koordinasi sumber daya pendidikan	1	100,000,000	
	Program Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan	1	280,830,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Biro	1	140,000,000	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Keagamaan	1	100,000,000	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	15	4,446,650,000	
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	12	3,801,823,000	
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	3	644,827,000	
	Dinas Pertambangan dan Energi	2	15,095,075,000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	2	15,095,075,000	
	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	4,093,000,000	
	Program pengembangan perikanan tangkap	1	4,093,000,000	
2	Revitalisasi pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional	198	41,174,037,375	1.89%
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	1,056,625,000	
	Program Pengembangan data/informasi	2	287,625,000	
	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	2	61,000,000	
	Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah	4	708,000,000	
	Biro Bina Mental	2	2,664,495,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Biro	1	115,000,000	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Keagamaan	1	2,549,495,000	
	Biro Otonomi Daerah	1	40,000,000	
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1	40,000,000	
	Biro Perekonomian	5	445,500,000	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	3	219,500,000	
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	1	76,000,000	
	Program Kerjasama Bidang Pendidikan dan Pengembangan Badan usaha Milik Rakyat (BUMRa)	1	150,000,000	
	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	24	5,639,037,000	
	Program Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Monitoring Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	2	101,500,000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Penyuluh dan Petani	5	528,250,000	
	Program Pengembangan Jejaring Kerjasama Agribisnis dan Kemitraan Agribisnis Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	6	973,465,000	
	Program Penataan, Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan	5	3,263,642,000	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan	6	772,180,000	
	Badan Ketahanan Pangan Daerah	31	4,375,466,750	
	Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan	31	4,375,466,750	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	24	4,822,881,400	
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	5	354,000,000	
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	6	1,973,557,000	
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	9	1,839,452,000	
	Program Peningkatan Pelayanan Mutu	4	655,872,400	
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	28	6,449,879,925	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	3	465,722,000	
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	6	413,441,100	
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	10	4,615,316,000	
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	6	521,341,025	
	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	2	402,254,000	
	Program peningkatan konsumsi pangan Hewani yang aman, sehat, utuh dan Halal (ASUH)	1	31,805,800	
	Dinas Kelautan dan Perikanan	40	13,226,332,300	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program pengembangan budidaya perikanan	17	4,446,185,300	
	Program pengembangan perikanan tangkap	12	6,688,452,000	
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	10	1,325,195,000	
	Program Pengembangan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan	1	766,500,000	
	Dinas Perdagangan	35	2,453,820,000	
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	6	235,500,000	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	6	462,770,000	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Kalibrasi dan Tertib Ukur	6	249,750,000	
	Program Peningkatan Distribusi dan Pemasaran Komoditi Provinsi Lampung	6	681,700,000	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	5	588,500,000	
	Program Pengembangan dan Peningkatan Sertifikasi dan Pengujian Mutu Barang	6	235,600,000	
3	Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan	124	290,072,054,765	13.34%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	1,756,217,500	
	Pengembangan Seni Budaya Lampung	2	1,756,217,500	
	Dinas Pengairan dan Pemukiman	18	249,039,325,100	
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	1	164,100,000,000	
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	7	19,078,978,300	
	Program Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung dan Lingkungan	5	63,232,501,200	
	Program Perencanaan Tata Ruang	4	1,647,020,000	
	Program Pengembangan Data/Informasi	1	980,825,600	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	942,616,365	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1	99,143,000	
	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	1	50,000,000	
	Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan	2	448,500,000	
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksana Pembangunan Daerah	1	85,000,000	
	Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2	161,773,365	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	1	98,200,000	
	Badan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Daerah	4	1,988,665,000	
	Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan	2	1,677,140,000	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1	213,125,000	
	Program Peningkatan Peran serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	1	98,400,000	
	Dinas Sosial	34	10,074,694,500	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	971,900,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	65,000,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4	121,160,000	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	324,714,500	
	Program pembinaan anak terlantar	4	4,458,520,000	
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	2	1,331,300,000	
	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	1	1,469,100,000	
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	2	908,000,000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	3	375,000,000	
	Program Keluarga Harapan	1	50,000,000	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31	18,524,298,300	
		1	0	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan dan Pemagangan	10	16,270,576,000	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	2	261,200,000	
	Program Pengembangan Kewirusahaan	1	122,180,000	
	Program Pengembangan data dan informasi	3	259,435,100	
	Program Pengembangan Hubungan Industrial	1	281,500,000	
	Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	2	188,440,000	
	Program Pembinaan dan Pengujian K3	2	384,680,000	
	Program Pengembangan Masyarakat melalui Transmigrasi	3	262,500,000	
	Program Pengembangan Museum Transmigrasi menjadi Pusat Layanan Informasi, Edukasi dan Sejarah Ketransmigrasian	3	272,170,000	
	Program Pengembangan Kawasan KTM	3	221,617,200	
	Dinas Pemuda dan Olahraga	1	46,590,000	
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1	46,590,000	
	Biro Bina Mental	6	500,000,000	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	4	250,000,000	
	Program Peningkatan Apresiasi Terhadap Kesenian dan Budaya	2	250,000,000	
	Biro Bina Sosial	1	388,000,000	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	388,000,000	
	Biro Perekonomian	2	103,400,000	
	Program Koordinasi Pembangunan Ekonomi dan Kemitraan	1	28,400,000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Program Kerjasama Bidang Pendidikan dan Pengembangan Badan usaha Milik Rakyat (BUMRa)	1	75,000,000	
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	15	6,505,748,000	
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	3	3,837,000,000	
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	3	225,000,000	
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	3	563,360,000	
	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PERKUATAN DESA, ADMINISTRASI DAN KELEMBAGAAN DESA	2	1,256,100,000	
	PROGRAM PEMANTAPAN KOORDINASI PROG. KHUSUS LINTAS SEKTORAL	2	320,788,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENERAPAN & PEMB. TTG, SDA, DAN LH	2	303,500,000	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	3	202,500,000	
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	1	53,000,000	
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1	100,000,000	
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1	49,500,000	
4	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	198	583,940,666,743	26.85%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	82	105,606,177,854	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4	4,830,341,300	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	12	7,288,520,625	
	Program Pendidikan Menengah	13	50,529,715,650	
	Program Pendidikan Luar Biasa	1	608,465,000	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3	974,402,500	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	9	13,638,752,650	

NO	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN TH 2016	%
	Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan	5	978,487,500	
	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	2	1,839,253,000	
	Program Pendidikan Tinggi	2	7,994,000,000	
	Program Kegiatan Belajar Mengajar	1	10,723,615,129	
	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	19	2,764,579,500	
	Program Pengembangan Nilai Budaya	1	5,795,000	
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	4	1,229,450,000	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	5	1,335,800,000	
	Pengembangan Seni Budaya Lampung	1	865,000,000	
	Dinas Kesehatan	25	86,211,052,650	
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2	10,497,176,500	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	4,159,575,500	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1	10,896,027,100	
	Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan	1	6,091,914,000	
	Program Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	1	858,350,000	
	Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan	2	45,357,271,200	
	Program kebijakan dan manajemen Pembangunan Kesehatan	4	617,553,000	
	Program Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1	894,000,000	
	Program Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional	2	418,864,750	
	Program Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	2	138,879,000	
	Program Pemberantasan Penyakit	1	4,344,946,500	
	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	1,132,749,100	
	Program Promosi Kesehatan	2	722,246,000	
	Program Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan	1	81,500,000	
	RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK	9	340,082,299,129	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	1,110,960,000	